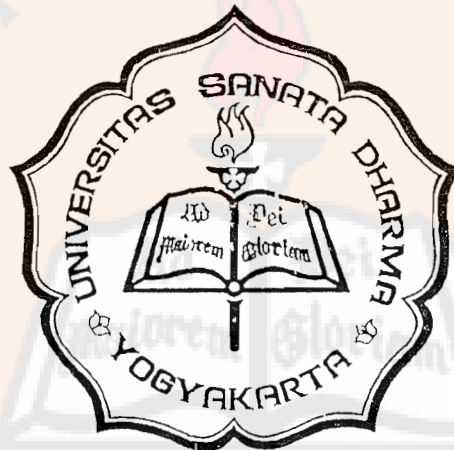


**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**KABINET BUCHO DI INDONESIA  
( 31 AGUSTUS - 14 NOVEMBER 1945 )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh :

**SRI BUDI WARDHANI**

NIM : 961314015

NIRM : 960051120604120012

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2002**

**KABINET BUCHO DI INDONESIA  
(31 AGUSTUS – 14 NOVEMBER 1945)**

Oleh:

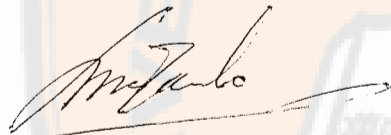
SRI BUDI WARDHANI

NIM : 961314015

NIRM : 960051120604120012

Telah disetujui oleh:


Pembimbing I



(Drs. G. Moedjanto, M.A)

Tanggal, 14 Mei 2002

Pemimbing II



(Drs. Sutardjo Adikusilo, J.R.)

Tanggal, 15 Mei 2002

SKRIPSI

KABINET BUCHO DI INDONESIA

(31 AGUSTUS – 14 NOVEMBER 1945)

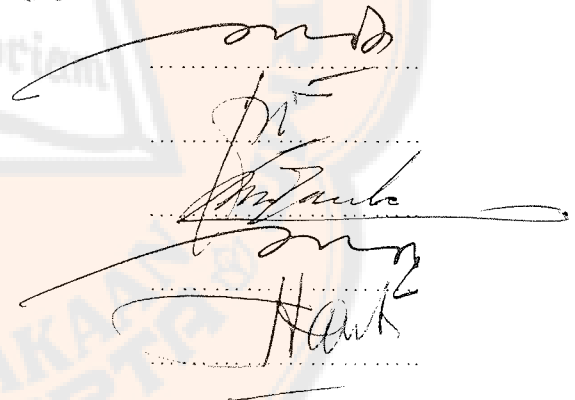
Dipersiapkan dan ditulis oleh :

SRI BUDI WARDHANI  
NIM : 961314015  
NIRM : 960051120604120012

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
pada tanggal 23 Mei 2002  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Susunan Panitia Penguji

Ketua        Drs. Sutardjo Adikusilo, J.R.  
Sekretaris    Drs. B. Musidi, M.Pd.  
Anggota      Drs. G. Moedjanto, M.A.  
Anggota      Drs. Sutardjo Adikusilo, J.R.  
Anggota      Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.



Yogyakarta, 23 Mei 2002  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Sanata Dharma  
Dekan,



DR. A.M. Slamet Soewandi, M.Pd.

HALAMAN PERSEMBAHAN



**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- ✎ Bapak (alm) dan Ibu tercinta, terima kasih atas do'a, perhatian dan dukungannya kepada ananda dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ✎ Suamiku tercinta, Jidi Hartono, Spd, yang selalu memberi perhatian dan dukungan.
- ✎ Buah hatiku Dicky Ananda, D.P
- ✎ Kakak-kakakku (Mas Anto, mas Yoyo, mbak Katna) yang selalu memberi perhatian.
- ✎ Adikku Tantri dan keponakanku Rivaldi Afrian A.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### MOTTO

♥ *Seberat apapun beban dan tugas kita, jika kita mau berusaha dan berdoa akhirnya akan terselesaikan juga.*

♥ *Janganlah kita berkata tidak bisa, jika kita belum pernah mencobanya.*



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

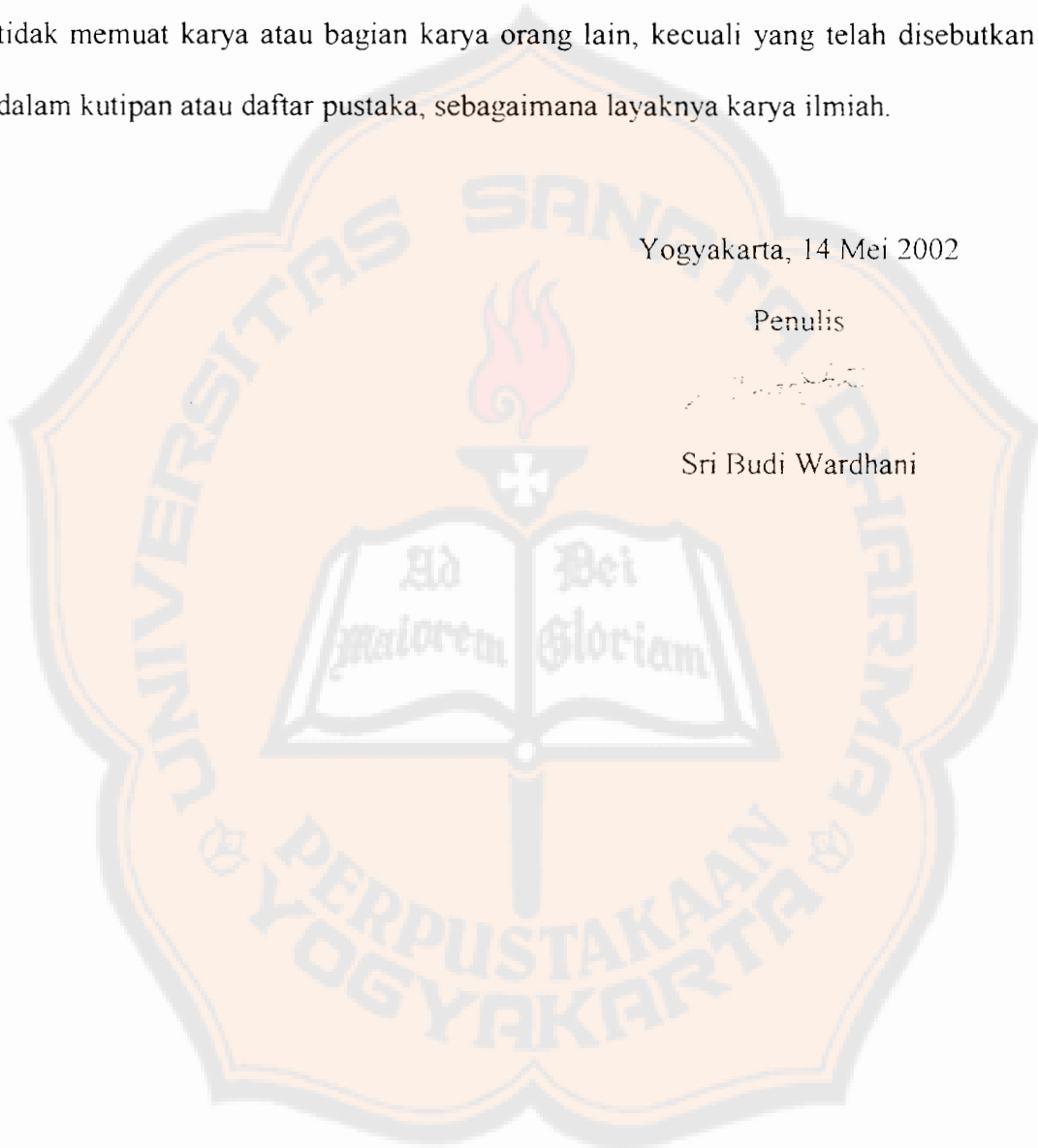
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan atau daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 14 Mei 2002

Penulis



Sri Budi Wardhani



**ABSTRAK**  
**KABINET BUCHO DI INDONESIA**  
**(31 AGUSTUS – 14 NOVEMBER 1945)**

**SRI BUDI WARDHANI**  
**UNIVERSITAS SANATA DHARMA**  
**YOGYAKARTA**  
**2002**

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui tentang kabinet Bucho di Indonesia dalam menjalankan pemerintahan selama kurang lebih tiga bulan (31 Agustus – 14 November 1945). Dalam skripsi ini ada tiga permasalahan pokok yang akan dibahas yaitu pertama bagaimana situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan, kedua bagaimana pembentukan dan susunan kabinet, bagaimana program kabinet dan pelaksanaannya, bagaimana reaksi masyarakat terhadap kabinet Bucho dalam menjalankan pemerintahan. Ketiga mengapa kabinet Bucho jatuh.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Penulisan skripsi ini menggunakan model deskriptif analisis. Sumber-sumber yang dikumpulkan kemudian dianalisis, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial dan politik untuk mengetahui keadaan sosial dan politik bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan.

Situasi politik bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan masih sangat kacau, perekonomian mengalami kemerosotan akibat penjajah Belanda dan Jepang. Keadaan ini menyebabkan kehidupan sosial masyarakat Indonesia menjadi kacau dan sangat menderita. Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan kabinet presidensiil. Dalam kabinet tersebut menteri-menteri yang duduk dalam kabinet terdiri dari para Bucho dan Sanyo yang bekerja pada pemerintahan Jepang, sehingga pembentukan kabinet ini mendapat tentangan dari golongan nasionalis yang revolusioner.

Setelah beberapa bulan kabinet menjalankan pemerintahan, kehidupan bangsa Indonesia tidak menjadi lebih baik. Kabinet tidak dapat memperbaiki keadaan. Muncul ketidakpuasan rakyat dan pemuda terhadap kabinet Bucho yang menyebabkan kabinet Bucho jatuh. Pada tanggal 14 November dibentuk kabinet Sjahrir I untuk menggantikan kabinet Bucho. Republik Indonesia mengubah sistem kabinet presidensiil menjadi sistem kabinet parlementer.

**ABSTRACT**  
**BUCHO CABINET IN INDONESIA**  
**(AUGUST 31 –NOVEMBER 14, 1945)**

**SRI BUDI WARDHANI**  
**SANATA DHARMA UNIVERSITY**  
**YOGYAKARTA**  
**2002**

The purpose of this thesis is to know the governmental of Bucho cabinet in Indonesia within 3 months (August 31 – November 14, 1945). It has three main problems, these are:

1. How was the politic, economic, social and culture condition in the beginning of Indonesian independent.
2. How were the formation and the structure of the cabinet, how was Bucho Cabinet in running governmental.
3. Why did Bucho Cabinet fall down.

The method of this thesis is historical method. That is aproces to examine and analyze critically on recording and old inheritance. Model of this thesis is descriptive analyses model. It analyses the sources that can solve the problem we will examine. It uses social and politicial research approach to know Indonesia social and politic situation in the beginning of independent.

Indonesian politic situation was still confusing then the economic decreased under Dutch and Japan colonization. It caused social living of Indonesian society being disarray and painful. Republic of Indonesia undertook president cabinet on its governmental. The cabinet ministers of this government consisted of Bucho and Sanyo we were working for Japan, so that this cabinet formation contraire to the revolutionary nationalism group.

Few months within the governmental, Indonesian was getting worse. The cabinet couldn't recover the condition. It emerged youth and public unsatisfying of Bucho Cabinet that caused it felt down. The goverment substituted Bucho cabinet by Syahrir I Cabinet on November 14. Republic of Indonesia had changed presidential cabinet into parlementer cabinet system.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Setelah melalui proses yang panjang dan dengan penuh kesabaran serta ketelitian akhirnya dapat dihasilkan penulisan skripsi yang berjudul *Kabinet Bucho di Indonesia (31 Agustus - 14 November 1945)*.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian Sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Penulis mengakui bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin selesai jika tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepala Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
2. Kepala Program Studi Pendidikan Sejarah.
3. Bp. Drs. G. Moedjanto, M.A., selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
4. Bp. Drs. Sutardjo Adisusilo. JR. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
5. Bp. Drs. J.B.M. Mudjihardjo, selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan mendampingi penulis selama menyelesaikan tugas belajar di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberi pelayanan peminjaman buku-buku yang diperlukan penulis bagi penyusunan skripsi ini.
7. Mbak Ning dan keluarga yang telah memberikan perhatian dan dorongan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Mbak Wati dan keluarga yang dengan tulus menjaga dan merawat Dicky selama ditinggal penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman di Wuluh 14 B, Yati, Eti, Rini, Henny, Tiwi, Nenya, Win, yang telah memberi perhatian dan dukungan kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman Pendidikan Sejarah Angkatan '96: Asti, Ida, Romanna, Erlin, Erni, Yanti, Sr. Vero, Minda, Anik, <sup>Edo Gombloh</sup> (Bimo), Yudha, Beny, Binex, Tanyo yang telah memberi perhatian dan persahabatan selama penulis menyelesaikan tugas belajar.
11. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis dengan senang hati bersedia menerima sumbangan baik pemikiran, kritik, maupun saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini berguna bagi siapa saja.

Yogyakarta, Mei 2002

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode dan Pendekatan Penelitian.....	13
F. Landasan Teori.....	16
G. Tinjauan Sumber.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II SITUASI POLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA BANGSA INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN.....	23
A. Situasi Politik.....	23

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Situasi Ekonomi .....	36
C. Situasi Sosial Budaya .....	41
BAB III KABINET BUCHO .....	47
A. Pembentukan dan Susunan Kabinet Bucho .....	47
B. Program Kabinet Bucho dan Pelaksanaannya .....	57
1. Bidang Keamanan .....	58
2. Bidang Ekonomi .....	59
3. Bidang Pendidikan dan Pengajaran .....	61
C. Reaksi Masyarakat terhadap Kabinet Bucho dalam menjalankan Pemerintahan .....	61
BAB IV JATUHNYA KABINET BUCHO .....	65
A. Sebab-sebab Jatuhnya Kabinet Bucho .....	65
B. Dampak dari Jatuhnya Kabinet Bucho bagi Pemerintah .....	76
C. Dampak dari Jatuhnya Kabinet Bucho bagi Bangsa Indonesia ..	80
BAB V SIMPULAN .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	85

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada bulan Maret 1942 pemerintah kolonial Belanda telah berakhir, mulailah masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kedatangan Jepang pada mulanya disambut baik oleh bangsa Indonesia. Rakyat percaya bahwa Jepang datang untuk memerdekakan bangsanya. Hal ini disebabkan karena taktik yang digunakan oleh Jepang untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia yaitu dengan cara memberi kebebasan untuk mengibarkan bendera Merah Putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang pada jaman penjajahan Belanda dilarang. Selain itu Jepang juga dapat meningkatkan status sosial ekonomi bangsa Indonesia dengan cara memasukkan orang Indonesia dalam pemerintahan dan diberi jabatan tertentu, sehingga rakyat percaya bahwa Jepang benar-benar akan memberikan kemerdekaan dan dapat mengeluarkan bangsanya dari penderitaan akibat penjajahan Belanda. Ikut sertanya orang Indonesia dalam pemerintahan sebenarnya memberi keuntungan tersendiri bagi Jepang, karena Jepang mengalami kekurangan staf pegawai akibat diberhentikannya para pegawai bangsa Belanda.

Jepang merasa diterima dengan tangan terbuka oleh bangsa Indonesia, maka untuk melanjutkan usahanya mempersatukan seluruh orang Asia yang pro Jepang dibentuk pergerakan Tiga A yang berbunyi Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia. Pergerakan ini

digunakan sebagai alat propaganda Jepang untuk menanamkan tekad penduduk agar selalu tunduk terhadap pemerintah Militer Jepang, sehingga tercapai kemakmuran di Asia. Selain Pergerakan Tiga A, Jepang terus melakukan propaganda yang intensif dengan menyerukan agar para pemuda Indonesia melawan Barat atau Sekutu yang akan menguasai bangsa mereka. Jepang tidak pernah menyadari bahwa propaganda yang dilakukannya justru akan berakibat munculnya semangat nasionalisme atau semangat kebangsaan bagi para pemuda untuk mengusir penjajah.

Untuk mendukung Jepang melawan Sekutu, maka Jepang membentuk organisasi pemuda. Pembentukan organisasi-organisasi pemuda oleh Jepang justru semakin memperkuat kesadaran akan kecintaannya pada tanah air mereka dan akan memberi kesempatan bagi para pemuda untuk saling bertukar pikiran. Banyak pemuda atau mahasiswa yang belajar di luar negeri pulang dengan membawa berbagai paham Barat dan paham tentang kebangsaan dari negara lain. Hal ini sangat mempengaruhi cara berpikir mereka dan mendorong semakin kuatnya keinginan mereka untuk mengusir penjajah dari negerinya. Pemuda-pemuda yang tergabung dalam organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang itu kebanyakan para pemuda golongan atas yang bekerja dalam pemerintahan Jepang di Indonesia, mereka menjadi barisan pelopor dalam menyebarkan ideologi nasionalis. Pengalaman mereka dalam organisasi pada waktu penjajahan Belanda mendorong pemuda golongan atas tersebut untuk bergaul ke bawah di tengah masyarakat umum

dan mengangkat para pemuda yang tidak berpendidikan ke arah tingkat pemuda Elite.<sup>1</sup>

Pendudukan Jepang sejak tahun 1943 telah dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia bahwa Jepang tidak berbeda dengan penjajah Belanda. Keadaan masyarakat lebih menderita akibat kebijakan ekonomi Jepang yang banyak menguras bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari rakyat untuk kepentingan bangsa Jepang sendiri. Dalam bidang pendidikan, Jepang memaksakan bahasa Jepang sebagai pengantar dalam pendidikan dan dalam pemerintahan semua menggunakan bahasa Jepang, pengibaran bendera Merah Putih dilarang diganti bendera Jepang dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilarang, seperti halnya pada waktu penjajahan Belanda. Masyarakat semakin gelisah, karena banyak pejabat-pejabat pemerintah yang korupsi, menyebabkan moral pejabat semakin rendah dan hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan penderitaan rakyat.

Kesengsaraan rakyat Indonesia semakin bertambah pada saat Jepang menjalankan program kerja paksa romusha. Para pekerja paksa itu mayoritas terdiri dari para petani miskin, sehingga penderitaan rakyat miskin semakin berat, sedangkan para pejabat pemerintah dengan caranya masing-masing membantu program romusha dengan mengambil keuntungan dari korupsi, perdagangan gelap dan pengumpulan beras secara paksa dari penduduk. Dengan kekerasan dan kekejaman Jepang berhasil menjalankan program kerja

---

<sup>1</sup>Ben Anderson, *Revoloesi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944 – 1946*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988, hal. 50.



paksa Romusha. Keadaan seperti ini membuat masyarakat mulai menyadari bahwa Jepang adalah penjajah yang sama dengan Belanda, sehingga mulailah golongan pemuda terjun ke masyarakat untuk memelopori gerakan anti Jepang. Rasa tidak puas terhadap Jepang ditunjukkan dengan pemberontakan-pemberontakan di berbagai daerah dan mulailah pembentukan organisasi-organisasi bawah tanah yang dipimpin oleh pelajar dan mahasiswa.

Setelah Jepang mengetahui berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, Jepang mulai khawatir dan menyadari bahwa mereka tidak lagi mendapat dukungan dari rakyat Indonesia, baik golongan biasa maupun golongan elite atau terpelajar. Jepang mulai memahami bahwa pergerakan kebangsaan Indonesia adalah suatu kekuatan yang nyata dan kuat, sehingga Jepang mengubah kebijakan politiknya secara radikal, mereka mengalihkan perhatiannya kepada para pemimpin nasionalis yang mereka yakini bahwa pemimpin tersebut benar-benar disukai rakyat.<sup>2</sup> Usaha Jepang untuk mendapatkan kembali dukungan dari rakyat yaitu dengan cara bekerjasama dengan tokoh-tokoh nasionalis yang dikagumi oleh masyarakat. Tokoh tersebut antara lain Mohammad Hatta, Sjahrir, Sjarifuddin, Jepang juga membebaskan Sukarno dari pembuangannya di Bengkulu dan memberi kebebasan kepadanya agar membina kemerdekaan Indonesia. Hal ini membuka kesempatan bagi golongan nasionalis untuk menyusun strategi melawan Jepang.

---

<sup>2</sup> George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Di Indonesia*, (Terjemahan), Jakarta : Sebelas Maret University Press bekerja sama dengan Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal. 133



Perjuangan nasionalis di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yang pertama secara terang-terangan atau melakukan kerjasama dengan pemerintah Jepang, seperti yang dilakukan oleh Sukarno dan Hatta. Sedangkan cara yang kedua yaitu secara diam-diam dengan membentuk suatu gerakan bawah tanah melawan Jepang yang dipimpin oleh Sjahrir. Pada 9 Maret 1943 dibentuk suatu organisasi yang diberi nama Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). Pendirian organisasi PUTERA ini atas usulan kaum nasionalis Indonesia yang ditujukan pada pemerintah Jepang dan telah disetujui oleh pemerintah Jepang dengan syarat organisasi tersebut harus membantu mewujudkan tujuan pemerintah militer Jepang yaitu mencapai kemenangan dalam perang melawan Sekutu di Asia.

Bagi bangsa Indonesia, organisasi PUTERA dibentuk untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan membangkitkan kembali kegiatan rakyat untuk berjuang guna mencapai cita-cita lama yaitu kemerdekaan Indonesia.<sup>3</sup> Dalam PUTERA yang menjadi ketuanya adalah Sukarno. Sedangkan pengurusnya disusun oleh Empat Serangkai yang terdiri dari Sukarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H. Mas Mansur dan disahkan oleh pemerintah militer Jepang. Organisasi PUTERA merupakan organisasi nasionalis, karena tokoh-tokoh yang ada dalam organisasi tersebut adalah para nasionalis yang sudah tua dan berpengalaman dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak penjajahan Belanda, sehingga dapat memperoleh simpati rakyat. Bagi pemerintah Jepang, organisasi

---

<sup>3</sup>) Mohammad Hatta. *Memoir*, Jakarta : Tintamas Indonesia. 1978. hal. 420.

PUTERA merupakan sarana untuk mengerahkan segala tenaga rakyat untuk memberi bantuan kepada usaha-usaha untuk mencapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya.<sup>4</sup>

Jepang sangat yakin bahwa pembentukan organisasi PUTERA dapat membantu pemerintah Militer Jepang untuk melawan Sekutu karena Jepang dapat mengikutsertakan pemimpin-pemimpin nasionalis Indonesia yang duduk dalam organisasi tersebut, tetapi sebenarnya PUTERA akan lebih menguntungkan bangsa Indonesia, karena dengan adanya organisasi PUTERA, para pemimpin nasionalis akan lebih mudah berhubungan langsung dengan rakyat, sehingga dapat dengan mudah menghimpun kekuatan rakyat untuk melawan Jepang dan menumbuhkan semangat kebangsaan bangsa Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran politik yang tinggi dan meningkatkan pendidikan rakyat.

Dalam rangka mencapai tujuannya, Jepang selain membentuk organisasi PUTERA juga membentuk organisasi militer dengan nama tentara Pembela Tanah Air yang lebih dikenal dengan nama PETA. Anggotanya terdiri dari para sukarelawan yang dilatih langsung oleh Tentara Jepang. Tujuan pembentukan PETA adalah untuk membantu Jepang melawan Sekutu. Organisasi militer ini sangat pesat perkembangannya, sehingga pada tahun 1944 rata-rata anggota PETA adalah nasionalis yang kuat, anti Jepang, anti Belanda, tetapi sebagian besar memihak Sekutu.<sup>5</sup> Jepang selalu menanamkan

---

<sup>4)</sup> Sartono Kartodirdjo, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta : Balai Pustaka, 1977, hal. 11.

<sup>5)</sup> George McTurnan Kahin, *op.cit.*, hal. 139.

kebencian terhadap Sekutu kepada anggota PETA, tetapi Jepang tidak pernah tahu bahwa sebenarnya kaum nasionalis yang tergabung dalam PETA selalu menanamkan kebencian atau perlawanan terhadap semua kekuasaan asing yang menguasai bangsanya. Pada akhirnya rakyat yang masuk dalam PETA menyadari bahwa Jepang sama seperti bangsa asing yang sedang menguasai negerinya, sehingga anggota PETA selalu bertambah banyak dan mencapai puncaknya pada tahun 1945.

Selain organisasi-organisasi yang dibentuk melalui kerjasama dengan pemerintah Jepang, juga dibentuk organisasi atau gerakan bawah tanah yang terdiri dari para pemuda terpelajar dan mahasiswa yang berkembang menjadi kekuatan besar, karena di dalamnya terdapat tokoh-tokoh nasionalis yang anti Jepang. Salah satu gerakan bawah tanah yang terbesar adalah gerakan yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir. Mereka menyebarkan ide-ide nasionalis anti Jepang pada masyarakat, sehingga gerakan tersebut mendapat dukungan yang besar dari rakyat. Gerakan bawah tanah akhirnya diketahui oleh pemerintah Jepang, sehingga Jepang segera menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dengan membentuk suatu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembentukan Badan ini merupakan wujud konkret dari janji Jepang tentang kemerdekaan Indonesia. Badan tersebut dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia. Ketua BPUPKI tersebut adalah Dr. Radjiman Wedyodiningrat dengan wakilnya Ichibangase Yoshio yang merupakan orang Jepang. Dalam melaksanakan tugasnya, BPUPKI

mengadakan sidang untuk membahas masalah dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan, serta rancangan Undang-Undang Dasar. Badan tersebut kemudian diganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, beranggotakan orang Indonesia yang diketuai oleh Sukarno. Badan tersebut baru bisa bersidang setelah proklamasi kemerdekaan.

Pada tanggal 10 Agustus 1945, berita tentang Jepang akan menyerah pada Sekutu telah terdengar oleh sebagian bangsa Indonesia lewat radio yang kebetulan tidak disegel oleh pemerintah Jepang. Beberapa organisasi bawah tanah telah bersiap-siap menghimpun kekuatannya untuk melawan Jepang. Sjahrir sebagai pemimpin gerakan bawah tanah terbesar segera mendesak Bung Hatta agar bersama Bung Karno segera memproklamkan kemerdekaan Indonesia dan meyakinkan bahwa Hatta boleh mengharapkan dukungan dari para gerilyawan dan beberapa unit PETA.<sup>6</sup> Para pemuda mendesak Sukarno agar memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1945, tetapi permintaan golongan pemuda tidak langsung dipenuhi oleh Sukarno, karena berita tentang kekalahan Jepang baru didengar lewat radio gelap, bukan dari pemerintah resmi. Sukarno merasa tidak berhak bertindak sendiri, karena sudah ada badan atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang lebih berhak memproklamkan kemerdekaan. Selain itu Jepang juga sudah menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

---

<sup>6</sup>) *Ibid.*, hal. 170.

Golongan pemuda tidak setuju apabila kemerdekaan dinyatakan oleh PPKI, karena mereka menganggap bahwa PPKI merupakan buatan Jepang, sehingga seolah-olah kemerdekaan tidak direbut dari Jepang, tetapi diberikan oleh Jepang. Adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan pemuda serta pendirian tegas Sukarno yang tidak mau memproklamkan dengan segera membuat golongan pemuda marah dan memutuskan untuk menculik Sukarno dan Hatta, mereka dibawa ke Rengasdengklok oleh para pemuda yang dipimpin oleh Sukarni. Mereka membawa Sukarno dan Hatta, karena mereka takut kalau Sukarno-Hatta dapat diperalat atau paling tidak dipengaruhi oleh Jepang.<sup>7</sup>

Pada tanggal 16 Agustus 1945, malam hari Sukarno – Hatta kembali ke Jakarta setelah Laksamana Maeda memberi jaminan dan bantuan tentang pernyataan kemerdekaan serta memberi penegasan bahwa Jepang sudah menyerah pada Sekutu, maka malam itu juga naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maeda dan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 naskah proklamasi dibacakan oleh Sukarno yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta dengan diikuti oleh pengibaran bendera Merah Putih dan Lagu Indonesia Raya dinyanyikan.

Revolusi Indonesia telah dilancarkan dan mendapat reaksi yang hebat, baik dari rakyat Indonesia sendiri maupun dari tentara Jepang yang masih menduduki daerah-daerah di Indonesia. Berita tentang proklamasi kemerdekaan diterima oleh rakyat tidak sama antara daerah yang satu dengan

---

<sup>7)</sup> G, Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid I*, Yogyakarta : Kanisius, 1988, hal. 87.

yang lain. Hal ini disebabkan karena banyak daerah yang masih dikuasai oleh Jepang, sehingga Jepang berusaha menghalangi informasi yang masuk pada rakyat agar rakyat tidak mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka. Tentara Jepang sendiri tidak pernah mengira bahwa rakyat Indonesia akan berani melakukan revolusi.

Bangsa Indonesia yang baru merdeka memerlukan suatu landasan yang kuat untuk mendirikan suatu pemerintahan yang baru tanpa campur tangan bangsa Jepang, sehingga perlu dibentuk Undang-Undang Dasar yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI yang anggotanya sudah ditambah dengan enam orang lagi mengadakan sidang dan telah berhasil membentuk Undang-Undang Dasar yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan disertai Penjelasan. Selain itu juga diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar yang baru ditetapkan.<sup>8</sup> Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden, maka secara formal negara Republik Indonesia sudah sempurna, karena seluruh syarat yang diperlukan oleh organisasi negara sudah ada yaitu adanya rakyat, wilayah, pemerintah dan kedaulatan.

Penulis mengangkat Judul Skripsi “Kabinet Bucho di Indonesia (31 Agustus – 14 November 1945)” dalam penelitian ini. Bagi penulis judul tersebut sangat menarik, karena topik tersebut belum ada yang menulis. Selain itu penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang kabinet Bucho dalam

---

<sup>8)</sup> *Ibid.*, hal. 89.



menjalankan pemerintahan pada masa transisi dari masa penjajahan ke masa awal kemerdekaan. Sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan adalah sistem pemerintahan kabinet presidensiil, dimana politik ditentukan oleh presiden yang bertanggungjawab atas semua kebijaksanaan. Menteri-menteri bertanggungjawab pada presiden dan mereka merupakan pembantu presiden.

Dalam skripsi ini, penulis akan mencoba membahas dan menguraikan tentang kabinet pertama yang dipimpin oleh Sukarno dan dikenal dengan sebutan Kabinet Bucho. Hal ini menarik bagi penulis, karena dalam kabinet tersebut seolah-olah anggotanya adalah orang Jepang, bukan orang Indonesia. Penulis ingin mencoba menguraikan hal-hal yang telah dikerjakan oleh Kabinet Bucho dalam jangka waktu yang sangat pendek, yaitu dari tanggal 31 Agustus sampai 14 November 1945. Selain itu sumber-sumbernya banyak dan menggunakan bahasa Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

Setelah membaca uraian mengenai latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumsukan beberapa permasalahan yang akan menjadi obyek penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut yaitu :

1. Bagaimana situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan?
2. Kabinet Bucho :
  - a. Bagaimana pembentukan dan susunan Kabinet Bucho ?
  - b. Bagaimana program kabinet dan pelaksanaannya ?

c. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap Kabinet Bucho dalam menjalankan pemerintahan ?

3. Mengapa Kabinet Bucho jatuh?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pengetahuan tentang sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan dan untuk mengetahui Kabinet Bucho dalam menjalankan pemerintahan dalam negara yang baru berdiri.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mendeskripsi tentang situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan.
- b. Untuk mendeskripsi tentang pembentukan dan susunan kabinet, program dan pelaksanaannya serta reaksi masyarakat terhadap Kabinet Bucho dalam menjalankan pemerintahan.
- c. Untuk mendeskripsi tentang faktor-faktor yang menyebabkan Kabinet Bucho jatuh.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang kabinet pertama di Indonesia dalam menjalankan pemerintahan.



## 2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini diharapkan akan dapat menambah dan melengkapi karya tulis ilmiah di Universitas Sanata Dharma.

## 3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan.

Penelitian ini dapat menambah dan memperkaya perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang kabinet pertama di Indonesia dalam menjalankan pemerintahan.

### **E. Metode dan Pendekatan Penelitian**

#### **i. Metode Penelitian**

Skripsi yang berjudul “Kabinet Bucho di Indonesia (31 Agustus – 14 November 1945)” menggunakan metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Untuk menghasilkan suatu tulisan sejarah, maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini sesuai dengan langkah-langkah dalam metode analisa sejarah menurut Louis Gottschalk yang membagi lima langkah dalam merekonstruksi peristiwa sejarah, yaitu memilih subyek untuk diteliti, mengumpulkan sumber, kritik sumber, interpretasi dan penulisan.<sup>9)</sup> Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

#### **a. Pemilihan Subyek untuk Diteliti**

Dalam skripsi ini, penulis mengambil judul “Kabinet Bucho di Indonesia (31 Agustus – 14 November 1945)”. Topik ini menarik untuk

---

<sup>9)</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Terjemahan Nugroho Notokusanto), Jakarta : Universitas Indonesia Press. 1983, hal. 32 – 34.

diteliti karena kabinet ini hanya mampu menjalankan pemerintahan selama kurang lebih tiga bulan, yang berlangsung dari 31 Agustus-14 November 1945, waktu yang sangat pendek untuk mengatur negara yang baru saja berdiri, sehingga dapat diteliti apa saja yang sudah dikerjakan oleh Kabinet Bucho atau kabinet pertama yang dipimpin oleh Sukarno.

### **b. Pengumpulan Sumber**

Dalam mengumpulkan sumber atau data, penulis menggunakan cara studi kepustakaan. Untuk mencari sumber data sebagai bahan penelitian ini, penulis menggunakan data historis yang diperoleh dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini, penulis dapat mengambil teori atau konsep yang dikemukakan oleh para ahli. Studi pustaka merupakan cara yang tepat untuk mencari sumber dalam penulisan skripsi ini, karena sumber yang diperlukan berupa buku-buku, dokumen-dokumen dan surat kabar.

### **c. Kritik Sumber**

Setelah penulis memperoleh sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan kritik sumber. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebenaran informasi yang telah diperoleh melalui buku-buku tersebut.

### **d. Interpretasi**

Setelah kebenaran dan keaslian sumber telah terjamin, maka interpretasi atau mengambil unsur-unsur yang dapat dipercaya dari sumber tersebut.

## e. Penulisan (Historiografi)

Setelah semua data terkumpul dan diinterpretasi, maka langkah selanjutnya sebagai tahap akhir yaitu penulisan (historiografi). Dalam penulisan sejarah, aspek yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah aspek kronologi dan gaya bahasa, sehingga dalam penulisan sejarah dapat terlihat dengan jelas urutan waktunya dan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar, maka dapat memberikan penjelasan terhadap pembaca.

Penulisan skripsi ini menggunakan model deskriptif analisis, sumber-sumber yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Melalui model penulisan tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu tulisan sejarah yang dapat dipercaya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan sosial dan politik. Pendekatan sosial digunakan sebagai alat menganalisis masalah yang ada dalam penulisan sejarah dengan memakai teori dan konsep dari ilmu sosial. Sebagai contoh untuk mengetahui kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945 digunakan teori dan konsep sosiologi. Teori sosiologi misalnya mengenai stratifikasi sosial, revolusi, kekuasaan. Selain itu juga digunakan konsep sosiologi, seperti perubahan

sosial, mobilitas sosial dan solidaritas, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia dapat digambarkan secara jelas dan menyeluruh.<sup>10</sup>

Pendekatan politik digunakan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Ilmu politik yang antara lain mencakup teori tentang negara, pemerintahan, kekuasaan, partai politik, militer dan kepemimpinan dapat digunakan untuk mengetahui dan mempelajari keadaan politik bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 dan pada awal kemerdekaan tahun 1945.

Dengan menggunakan pendekatan sosial dan politik tersebut, maka penulisan sejarah dapat digambarkan secara lengkap dan menyeluruh.

## F. Landasan Teori

Dalam penulisan skripsi ini, yang dibahas adalah Kabinet Bucho atau kabinet pertama di Indonesia (31 Agustus -- 14 November 1945), maka dalam usaha mencari jawaban atas permasalahan yang ada diperlukan berbagai definisi atau pengertian yang berhubungan dengan judul skripsi ini agar lebih mudah dalam pemahamannya. Pertama-tama yang harus dimengerti adalah mengenai sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem pemerintahan mempunyai arti seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas yang menjalankan wewenang dan

---

<sup>10</sup>) Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1995, hal.155 – 116.

kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.<sup>11</sup> Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan dipegang oleh militer Jepang yang dibagi menjadi tiga pemerintahan militer pendudukan pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara Keduapuluh Lima) untuk Sumatera, Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Keenambelas untuk Jawa – Madura), Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) untuk daerah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan dan Maluku. Jepang dalam menjalankan pemerintahan memasukkan orang-orang Indonesia, karena masih kekurangan pegawai. Bagi orang Indonesia hal ini sangat menguntungkan, karena dapat menambah pengalaman mereka dalam pemerintahan.

Setelah Indonesia merdeka, maka pemerintah dipegang oleh bangsa Indonesia dengan sistem pemerintahan kabinet presidensiil. Menurut C.S.T. Kansil, kabinet presidensiil ialah suatu kabinet dimana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintahan dipegang oleh presiden sendiri, presiden merangkap memegang jabatan perdana menteri (Presiden/Perdana Menteri).<sup>12</sup> Menteri-menteri dalam menjalankan tugasnya harus bertanggungjawab pada presiden, sehingga kedudukan para menteri hanya sebagai pembantu presiden saja. Presiden bertugas memimpin dewan menteri, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Presiden juga berhak memberhentikan menteri-menteri tersebut dan berhak mengubah susunan

---

<sup>11</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, hal. 672 dan 849.

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990, hal. 110.

kabinet sesuai kehendaknya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Sukarno dipilih menjadi presiden dan sekaligus merangkap menjadi Perdana Menteri yang memimpin kabinet.

Sebelum kabinet presidensiil pertama secara resmi dibentuk, maka pada tanggal 30 Agustus 1945 diadakan suatu konferensi pejabat kerajaan se-Jawa dan Madura di Jakarta. Dalam konferensi tersebut dinyatakan bahwa, walaupun Indonesia sudah merdeka, tetapi di Indonesia seolah-olah ada dua pemerintahan yaitu pemerintahan Balatentara Dai Nippon yang diwajibkan menjaga keamanan umum dan pemerintahan Republik yang didirikan oleh bangsa Indonesia sendiri.<sup>13</sup>

Kabinet pertama Republik Indonesia yang dibentuk dan di bawah kepemimpinan Sukarno dikenal dengan nama Kabinet Bucho, karena dalam kabinet tersebut menteri-menterinya adalah bekas Bucho (kepala departemen) dalam pemerintahan Jepang, sehingga banyak orang menyebutnya dengan nama kabinet Bucho, terutama oleh golongan yang tidak menyetujui pembentukan kabinet tersebut. Menteri-menteri yang sudah diangkat masih banyak yang merupakan pegawai Jepang, sehingga bersifat dualistis, yaitu di satu pihak masih menjadi pegawai Jepang yang masih berkuasa dan di lain pihak telah diangkat sebagai menteri-menteri Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Menurut Kamus Bahasa Jepang, 'Bucho' mempunyai arti Kepala Bagian.<sup>14</sup>

---

<sup>13)</sup> Ben Anderson, *op. cit.*, hal. 136.

<sup>14)</sup> Chandra, T., 1992, *Kamus Jepang- Indonesia*, Jakarta : Evergreen Japanese Course, hal. 10.



Tanggal 31 Agustus – 14 November 1945 merupakan masa pemerintahan Kabinet Bucho. Kabinet ini hanya berlangsung kurang lebih tiga bulan, karena kabinet ini mendapat pertentangan dari kaum nasionalis yang menganggap bahwa kabinet ini sama saja dengan pemerintahan pada masa pendudukan Jepang. Hal ini disebabkan karena yang duduk dalam kabinet tersebut adalah orang-orang yang bekerja sama dengan pemerintah Jepang.

## G. Tinjauan Sumber

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber tertulis yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan sejarah, sumber-sumber yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri menyaksikan peristiwa tersebut terjadi atau pelaku-pelaku peristiwa itu sendiri. Sedangkan sumber sekunder adalah merupakan kesaksian dari seseorang yang tidak menggunakan mata kepala sendiri atau dari seseorang yang tidak menyaksikan sendiri dalam peristiwa yang dikisahkannya.<sup>15</sup>

Sumber-sumber sebagai acuan pokok dalam penulisan skripsi ini, antara lain buku yang berjudul *Revoloesi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944 – 1946* karangan Ben Anderson, terbitan tahun 1988. Buku ini berisi antara lain tentang Indonesia pada masa pendudukan Jepang hingga revolusi kemerdekaan. Selain itu juga berisi tentang

---

<sup>15</sup> Louis Gottschalk, *op.cit* , hal. 35

pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan dan masa pemerintahan kabinet pertama yang dipimpin Sukarno sampai berakhirnya kabinet tersebut. Selanjutnya buku yang berjudul *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* karangan George McTurman Kahin, terbitan tahun 1995. Buku ini berisi antara lain tentang masa penjajahan Jepang sampai pada pecahnya revolusi. Buku ini tidak hanya unggul sebagai karya ilmiah tetapi juga merupakan kesaksian hidup dari sejarah revolusi Indonesia, karena buku ini merupakan disertasinya dan Kahin terjun langsung dalam kancah revolusi Indonesia.

Buku yang ketiga adalah buku yang berjudul *Memoir* karangan Mohammad Hatta, terbitan tahun 1978. Buku ini antara lain berisi tentang pergerakan nasional bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang sampai dengan masa pemerintahan kabinet pertama pada awal kemerdekaan. Buku ini dapat dijadikan sebagai acuan pokok, karena ditulis oleh Mohammad Hatta sendiri yang mengalami peristiwa tersebut, sehingga yang ditulis dapat dipercaya. Buku yang keempat adalah buku yang berjudul *Perjuangan Revolusi* terbitan tahun 1987, karangan Soebadio Sastrosatomo. Buku ini berisi tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam masa pendudukan Jepang sampai proklamasi kemerdekaan, buku ini juga menguraikan tentang peranan kabinet pertama dalam pemerintah Indonesia yang baru berdiri. Buku yang kelima yaitu *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan* karangan Bernhard Dahm, terbitan tahun 1987, berisi tentang perjuangan Bung Karno dalam kemerdekaan Indonesia.



Di samping buku-buku sebagai acuan pokok seperti yang telah disebutkan di atas, penelitian ini juga menggunakan buku-buku lain untuk membantu membahas permasalahan yang ada dan yang sesuai dengan topik dalam penelitian ini. Buku-buku tersebut antara lain : *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI* karangan Sartono Kartodirdjo dkk., terbitan tahun 1977, berisi tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang hingga revolusi kemerdekaan. Selanjutnya buku yang berjudul *Mengenang Sjahrir* yang ditulis oleh Rosihan Anwar terbitan tahun 1980, berisi tentang perjuangan Sjahrir. Kemudian buku yang berjudul *Gelora Api Revolusi Sebuah Ontologi Sejarah*: karangan Colin Wild dan Peter Carey, dan masih banyak lagi sumber yang digunakan dalam penelitian ini yang tidak perlu disebutkan satu persatu. Sumber-sumber lainnya tentu saja yang berkaitan dengan topik dan dapat membantu membahas permasalahan yang ada.

## H. Sistematika Penulisan

Skripsi tentang Kabinet Bucho di Indonesia (31 Agustus – 14 November 1945) dengan sistem penulisan sebagai berikut :

Bab I atau Pendahuluan, antara lain berisi tentang uraian keterkaitan antara latar belakang masalah dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan juga diuraikan tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selain itu juga dijelaskan mengenai metode dan pendekatan yang digunakan, Landasan teori, tinjauan sumber dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang deskripsi mengenai situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan.

Bab III berisi uraian tentang Kabinet Bucho di Indonesia dalam menjalankan pemerintahan. Bab ini menguraikan tentang pembentukan dan susunan kabinet, program kabinet dan pelaksanaannya, tentang reaksi masyarakat terhadap Kabinet Bucho.

Bab IV berisi uraian tentang jatuhnya Kabinet Bucho. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sebab-sebab Kabinet Bucho jatuh, dampak dari jatuhnya Kabinet Bucho bagi pemerintah dan dampak dari jatuhnya Kabinet Bucho bagi bangsa Indonesia.

Bab V merupakan bab penutup. Dalam bab ini disajikan tentang simpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dalam Bab II, III dan Bab IV.

Demikianlah pendahuluan dalam penelitian ini. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa melalui penelitian ini, penulis ingin membuat suatu tulisan mengenai Kabinet Bucho di Indonesia (31 Agustus-14 November 1945). Permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini akan dibahas dalam bab-bab berikutnya.

## BAB II

### SITUASI POLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA BANGSA INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN

#### A. Situasi Politik

Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai tanda bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka, lepas dari penjajah yang selama bertahun-tahun menguasainya. Sebagai negara yang baru berdiri, Republik Indonesia harus membentuk suatu lembaga pemerintahan untuk mengatur kehidupan bernegara. Untuk membuat peraturan-peraturan, maka dibentuk Undang-Undang Dasar sebagai landasan atau dasar negara.

Republik Indonesia yang baru berdiri ini telah mempunyai syarat berdirinya suatu negara yaitu adanya rakyat, wilayah, pemerintahan dan kekuasaan serta adanya pengakuan dari negara lain.<sup>1</sup> Meskipun Indonesia sudah merdeka, tetapi situasi politik bangsa Indonesia masih kacau.

Bangsa Indonesia harus menghadapi beberapa persoalan antara lain mengatur negara dan menjalankan pemerintahannya, mengendalikan luapan kegembiraan rakyat yang merasa terbebas dari belenggu kekuasaan asing dan harus bersiap-siap menghadapi tentara Sekutu yang akan mendarat di Indonesia, yang lebih sulit adalah menghadapi bangsa Jepang yang tidak mau meninggalkan Indonesia, karena bangsa Jepang tidak mau mengakui

---

<sup>1</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000, hal. 42-44.

kemerdekaan Republik Indonesia dan masih ingin menguasainya. Hal ini terlihat dengan adanya tentara Jepang yang masih menggunakan senjata, tidak mau menyerahkan senjata dan perlengkapannya kepada bangsa Indonesia. Bendera-bendera Jepang Hinomaru masih berkibar di kantor-kantor, menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia dan ingin segera menurunkannya dan mengusir Jepang dari tanah airnya.

Setelah Jepang kalah dalam perang Pasifik, Jepang harus menerima semua perintah dari Sekutu untuk tetap menjaga status quo politiknya di daerah yang dulu didudukinya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama untuk membentuk suatu pemerintahan Republik, pada kesempatan itu Jendral Yamamoto yang mewakili Jepang secara resmi menyatakan kepada Sukarno dan Hatta bahwa Jepang akan meneruskan pemerintah militernya di Jawa dibawah komando panglima tertinggi Angkatan Darat Jepang, untuk memelihara status quo dan untuk menjamin keamanan: serta ketertiban sampai dengan penyerahan segala sesuatunya kepada Sekutu selesai.<sup>2</sup>

Dalam negara Indonesia yang baru berdiri ini seolah-olah ada dua pemerintahan yaitu pemerintah Republik Indonesia yang baru saja dibentuk dan pemerintah militer Jepang yang masih berkuasa di Jawa. Walaupun kekuasaan Jepang masih terlihat di Republik Indonesia, tetapi semua perintah

---

<sup>2)</sup> Ben Anderson, *Revoloesi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988, hal. 107.



yang dipakai adalah perintah dari atasan orang Indonesia. Hal ini membuat Jepang marah sehingga terjadi bentrokan-bentrokan dengan rakyat Indonesia.

Perlucutan senjata tentara Jepang juga terus dilakukan terutama di daerah Jawa dan Sumatra, karena di daerah tersebut terdapat banyak unit PETA, sehingga tentara Jepang tidak mampu melawannya. Persoalan yang muncul dalam negara yang baru merdeka ini adalah adanya ketidak puasan para pemuda yang anti penjajah Jepang terhadap pemerintah yang baru. Mereka ingin agar pemerintahan dipegang oleh bangsa Indonesia golongan nasionalis dan demokratis. Mereka merasa bahwa pemerintahan yang baru berdiri masih berbau Jepang karena yang duduk dalam pemerintahan adalah orang-orang yang pada masa penjajahan Jepang menjadi pegawai pemerintahan Jepang. Pemuda juga menuntut agar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dianggap buatan Jepang itu harus diganti namanya.

Pada tanggal 23 Agustus 1945 dikeluarkan Dekrit pertama mengenai bahan-bahan pelengkap pemerintahan yang disetujui pada tanggal 20 Agustus 1945. Dalam Dekrit tersebut diterangkan tentang dibentuknya Komite Nasional Indonesia (KNI), Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal.<sup>3</sup>

Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan PNI dapat dikatakan terjadi dalam waktu yang hampir sama, KNIP yang anggotanya

---

<sup>3</sup>) Soejono Martosewojo, *Mahasiswa '45 Prapatan-10 : Pengabdianya, Jilid 1*, Bandung : Patma, 1984, hal. 104.

baru 60 orang mulai bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia, maka selesailah penetapan-penetapan Aturan Peralihan dalam UUD 1945.<sup>4</sup> Komite Nasional Indonesia Pusat berpusat di Jakarta dengan tugas membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan yaitu sebagai penasehat presiden, sedangkan di daerah-daerah dibentuk Komite Nasional Daerah yang anggotanya adalah bekas anggota PPKI dari daerah masing-masing dan bertugas membantu pemerintah daerah.

Partai Nasional Indonesia yang dijadikan sebagai partai tunggal, pembentukannya mendapat pertentangan dari para pemuda dan rakyat, tetapi Sukarno tetap menghendaki sebuah partai tunggal, karena dengan adanya partai tunggal kesatuan bangsa akan lebih terjaga. Rakyat hanya akan memilih satu partai saja, tetapi apabila ada beberapa partai, rakyat akan terpecah dan mementingkan golongannya sendiri-sendiri, sehingga kesatuan negara bisa terancam. Akhirnya dapat disetujui adanya satu partai yang diakui di negara Republik Indonesia, partai tersebut diberi nama Partai Nasional Indonesia (PNI).

Setelah Jepang kalah dalam perang pasifik, Jepang mendapat perintah dari Sekutu untuk tetap menjaga status quonya sampai Sekutu datang. Sekutu yang datang ke Indonesia pada tanggal 29 September 1945 mendapat reaksi yang hebat dari rakyat Indonesia. Rakyat menyampaikan protes terhadap pimpinan kabinet RI, karena pemerintah dianggap kurang bersungguh-

---

<sup>4</sup> Mohammad Hatta. *op.cit.* hal. 461



sungguh dalam merebut kekuasaan dari Jepang. Hal ini terlihat masih banyaknya tentara Jepang yang menguasai daerah-daerah di luar ibukota dan masih banyak tentara Jepang yang bertindak semena-mena terhadap rakyat Indonesia, sehingga sering terjadi bentrokan antara rakyat dan tentara Jepang.

Pemuda-pemuda di Jakarta khususnya, merasa bahwa orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan tidak sepenuhnya memihak rakyat dan bersikap terlalu lunak terhadap kekuasaan Jepang, sehingga rakyat merasa perlu mengambil tindakan untuk dapat mewujudkan cita-cita perjuangan, yaitu menjadi bangsa yang merdeka, lepas dari kekuasaan asing dan dapat menentukan nasib sendiri serta diakui oleh dunia internasional.

Pada tanggal 1 September 1945 dibentuk Angkatan Muda Indonesia (AMI) yang bermarkas di Menteng 31 dengan ketuanya Wikana dan wakil ketua Chairul Saleh. Selain itu juga dibentuk Barisan Rakyat yang umumnya terdiri dari para petani dan Barisan Buruh. Ketiga organisasi ini bertindak dibawah naungan Komite Aksi yang bermarkas di Menteng 31. Komite ini mengeluarkan sebuah manifesto yang berbunyi sebagai berikut :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sekarang rakyat telah merdeka bebas dari kekuasaan asing.
2. Semua kekuasaan harus berada di tangan negara dan rakyat Indonesia.
3. Jepang telah kalah dan tidak berhak memerintah lagi di wilayah Indonesia.
4. Rakyat Indonesia harus merebut senjata dari tangan Jepang.

5. Semua perusahaan (kantor, gudang, pabrik dll) harus direbut dari Jepang untuk dikuasai oleh bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

Manifesto yang dibuat oleh Komite Aksi ini kemudian diikuti oleh tindakan-tindakan mengambil alih stasiun kereta api, stasiun radio dan kantor-kantor yang masih dikuasai oleh orang-orang Jepang. Pemuda yang bergabung dengan rakyat Indonesia penuh keberanian merampas senjata dan perlengkapan tentara Jepang.

Situasi politik terutama di Jakarta semakin memanas ketika pada tanggal 19 September 1945, pemuda-pemuda yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar yang bergabung dengan seluruh lapisan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya memadati lapangan Ikada untuk meminta kepada pemerintah agar bersikap tegas terhadap Jepang dan segera mengusirnya, sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka sepenuhnya tanpa adanya campur tangan dari kekuasaan asing. Selain itu rakyat merasa pemerintah belum bisa menjalin hubungan yang erat dengan rakyat sehingga kesatuan bangsa bisa terancam. Rakyat menginginkan agar pemerintah pusat membuat pernyataan bahwa Indonesia benar-benar sudah merdeka dan harus menentukan nasibnya sendiri.<sup>6</sup>

Rapat raksasa di Ikada pada tanggal 19 September 1945 merupakan satu ujian dan sekaligus perwujudan pertama akan kesadaran rakyat Indonesia untuk hidup bernegara, berpemerintahan serta kesediaannya untuk berjuang

---

<sup>5</sup>) Soebadio Sastrosatomo. *Perjuangan Revolusi*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1987. hal. 47

<sup>6</sup>) *Ibid*, hal. 47.



dan berkorban untuk negaranya, serta untuk mengisi tegaknya proklamasi 17 Agustus 1945. Peristiwa itu merupakan pengejawantahan pertama dari semangat dan jiwa '45.<sup>7</sup>

Sebenarnya sebelum rapat raksasa di Ikada berlangsung, Jepang sudah mengetahui tindakan pemuda dan rakyat tersebut, sehingga pada tanggal 16 September 1945 Jepang melarang rapat tersebut diadakan, tetapi larangan Jepang itu tidak dihiraukan oleh rakyat Indonesia. maka Jepang mengumumkan berlakunya keadaan perang. Ancaman Jepang itu ternyata tidak membuat rakyat mundur, justru rakyat semakin bersemangat dan siap menghadapi Jepang, walaupun harus mengorbankan jiwa dan raganya. Rapat raksasa itu sebenarnya bertujuan agar dunia internasional mengakui bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka dan diperoleh melalui perjuangan yang panjang oleh rakyat Indonesia, jadi bukan merupakan pemberian dari Jepang.

Pemerintah Indonesia juga membuat larangan agar rapat raksasa tersebut jangan dilaksanakan, karena dapat terjadi bentrokan dengan tentara Jepang yang sudah siap dengan perlengkapan di jalan dan sewaktu-waktu dapat menyerang rakyat Indonesia, tetapi kekhawatiran pemerintah tidak dihiraukan oleh rakyat sebelum rakyat mendengarkan pernyataan dari pemerintah. Akhirnya Sukarno-Hatta dan menteri-menteri dalam kabinet memutuskan untuk menghadiri rapat tersebut dan Sukarno menyampaikan pidato singkatnya di depan beratus ribu rakyat Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>7)</sup> A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid I Proklamasi*, Bandung : Angkasa, 1977, hal. 294.

<sup>8)</sup> Ben Anderson, *op.cit.*, hal. 146.

Setelah rakyat mendengar pidato Sukarno, maka dengan tertib rakyat segera membubarkan diri, meskipun Sukarno dianggap sebagai kolaborator Jepang oleh kelompok pemuda bawah tanah yang dipimpin oleh Sjahrir, tetapi dimata rakyat Sukarno tetap mempunyai wibawa yang besar dan rakyat masih mempercayainya. Kepercayaan rakyat kepadanya membuat Sukarno semakin percaya diri dalam menjalankan pemerintahan, karena merasa ada dukungan yang besar dari rakyat Indonesia, sehingga akan memperlancar jalannya pemerintahan yang baru.<sup>9</sup>

Keadaan politik di Republik Indonesia semakin memanas ketika Letnan Jendral Sir Philip Christison sebagai panglima Sekutu mengumumkan bahwa pasukan Sekutu sudah mendarat di Jakarta. Tujuan pasukan Sekutu datang ke Indonesia adalah untuk menerima penyerahan kekuasaan pemerintah Jepang dan melucuti senjata tentara Jepang serta membebaskan tawanan perang Sekutu.<sup>10</sup> Pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Inggris tidak tahu kondisi Indonesia dan Inggris menyatakan tidak akan mencampuri urusan bangsa Indonesia. Kedatangan pasukan Sekutu ke Indonesia telah dimanfaatkan oleh pasukan Belanda yang ingin menanamkan kembali kekuasaannya di Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan pada rakyat agar tidak berurusan dengan pasukan Inggris, akan tetapi rakyat takut adanya penjajahan lagi dan ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sudah

---

<sup>9)</sup> Soebadio Sastrosatomo, *op.cit.*, hal. 51.

<sup>10)</sup> George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, Jakarta : Sebelas Maret University press bekerjasama dengan Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal.180.

merdeka, sehingga negara asing harus pergi. Kecurigaan rakyat semakin bertambah setelah sekutu memberi perintah kepada para komandan Jepang untuk menyerang dan merebut kembali kota-kota yang sudah dikuasai oleh orang Indonesia. Hal ini mendorong orang Indonesia untuk melawan Sekutu dan sekaligus Belanda.<sup>11</sup>

Kemarahan rakyat terhadap Sekutu dan Belanda tidak dapat terbendung lagi, sehingga pertempuran antara rakyat dan Sekutu terus terjadi terutama hampir diseluruh pulau Jawa dan yang paling terkenal adalah pertempuran Surabaya yang telah menewaskan Panglima Tentara Inggris Brigadir Mallaby dari pihak Sekutu. Pertempuran Surabaya membuat Sekutu tergoncang dan melihat kenyataan bahwa Sekutu tidak bisa melawan kekuatan rakyat Indonesia yang dengan rela mengorbankan jiwa dan raganya bagi berdirinya Republik Indonesia merdeka. Akhirnya Sekutu merubah kebijakan-kebijakannya yaitu bekerjasama dengan para pemimpin Republik dan bersikap tidak memihak terhadap Belanda.<sup>12</sup>

Sekutu mendesak kepada Belanda dan Republik Indonesia untuk mengadakan perundingan secara damai, tetapi Belanda menolak, sehingga pertempuran melawan Belanda terus terjadi di daerah-daerah lain di luar Jawa dan korban terus berjatuhan baik dari pihak Republik maupun dari pihak Belanda.

---

<sup>11)</sup> *Ibid*, hal. 182.

<sup>12)</sup> *Ibid*, hal. 183.

Pemerintah Republik Indonesia harus menghadapi persoalan yang sulit, karena harus menghadapi kekuasaan asing yang masih menduduki negerinya dan menghadapi golongan yang menentang pemerintah kabinet pimpinan Sukarno, walaupun Indonesia sudah berdiri dan dibentuk suatu pemerintahan, tetapi masih muncul kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan tersebut, karena orang yang duduk dalam pemerintahan itu adalah orang-orang yang pada jaman pendudukan Jepang mau diajak kerjasama, sehingga dianggap masih berbau Jepang. Sukarno dan Hatta juga dicap sebagai kolaborator Jepang, sehingga ada kelompok-kelompok yang ingin berusaha menyingkirkan mereka dari pemerintah, agar pemerintahan Indonesia bersih dari para kolaborator Jepang.

Kelompok-kelompok yang sangat menentang pemerintahan Sukarno-Hatta adalah kelompok gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh Sjahrir dan kelompok yang dipimpin oleh Tan Malaka. Pada awalnya Sjahrir tidak mau diajak bergabung dalam pemerintahan, akan tetapi Sukarno-Hatta meminta kepada Sjahrir agar bergabung dalam pemerintahan. Sjahrir tidak bisa menyangkal bahwa rakyat pada umumnya memandang Sukarno sebagai pemimpin revolusi dan sebagai pemimpin mereka yang harus dipatuhi, selain itu dukungan rakyat pada Sukarno begitu besar. Melihat kenyataan tersebut Sjahrir akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan, tetapi menolak untuk duduk dalam kabinet.<sup>13</sup>

---

<sup>13)</sup> *Ibid*, hal. 185.

Pada akhir bulan September 1945, anggota KNIP mengadakan rapat yang akan membicarakan tentang perlunya mengangkat pimpinan nasional yang dapat memanfaatkan situasi dunia untuk kepentingan negara RI. Pemimpin nasional yang dianggap mampu melaksanakannya adalah bung Sjahrir, karena ia merupakan pemimpin nasionalis yang tidak pernah mau bekerja sama dengan Jepang.<sup>14</sup> Dengan diikutsertakannya Sjahrir dalam pemerintahan, akan memberi keadaan yang berbeda, karena kelompok pengikut Sjahrir akan mendukungnya dan pemerintahan tidak hanya dipegang oleh orang-orang yang bekerjasama dengan Jepang.

Dalam rapat anggota KNIP tersebut dibicarakan perlunya mengangkat Sjahrir sebagai Perdana Menteri (PM) akan tetapi yang menjadi persoalan adalah dalam UUD 1945, RI merupakan pemerintahan presidensiil bukan parlementer, maka untuk mengangkat Sjahrir sebagai Perdana Menteri perlu adanya perubahan dalam UUD 1945, yaitu mengenai sistem pemerintahan Kabinet Parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri.

Badan yang bisa merubah UUD 1945 adalah MPR, tetapi pada saat ini MPR belum terbentuk, yang ada hanya KNIP sebagai pembantu presiden, maka KNIP perlu diubah statusnya menjadi MPR. Selain itu KNIP merupakan suatu badan yang besar sehingga tidak efektif dalam menjalankan tugasnya, karena banyak anggota KNIP diperlukan di daerah-daerah, maka

---

<sup>14)</sup> Soebadio Sastrosatomo, *op.cit.*, hal.61.

dibentuk suatu Badan Pekerja untuk melaksanakan tugas KNIP sehari-hari. Badan tersebut bertanggung jawab pada KNIP.<sup>15</sup>

Dalam sidang KNIP tanggal 16 Oktober 1945, dikeluarkan suatu Maklumat yang dikenal dengan Maklumat Wakil Presiden No. X, yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:

1. KNIP sebelum MPR-DPR terbentuk disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
2. Berhubung gentingnya keadaan, banyak anggota KNIP yang diperlukan di daerah-daerah, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja (BP).<sup>16</sup>

Ketua Badan Pekerja KNIP adalah Sjahrir dan wakil ketuanya Amir Sjarifuddin. Setelah Badan Pekerja terbentuk, maka anggota KNIP juga ditambah lagi dengan orang-orang yang tidak pernah bekerjasama dengan Jepang, sehingga KNIP lebih bersifat nasional. Badan Pekerja KNIP mulai bekerja tanggal 18 Oktober 1945 dibawah pimpinan pemimpin-pemimpin yang anti Jepang dan terdiri dari orang-orang yang modern dan moderat yang berpandangan politik dan menganut ideologi sosialis.<sup>17</sup>

Kelompok lain yang menentang pemerintahan Sukarno adalah kelompok Tan Malaka yang sangat berambisi untuk menduduki posisi tertinggi dalam Republik untuk menggantikan Sukarno. Agar cita-cita Tan Malaka dapat tercapai, maka Tan Malaka mendesak Sukarno untuk membuat

---

<sup>15)</sup> *Ibid*, hal. 63.

<sup>16)</sup> Moedjanto, *op.cit.*, hal. 142-143.

<sup>17)</sup> Soebadio Sastrosatomo, *op.cit.*, hal. 168.



testamen politik atau ketetapan tegas bahwa Tan Malaka dapat meneruskan kepemimpinan Republik apabila Sukarno-Hatta tertangkap oleh Sekutu atau Belanda.

Sukarno menyetujui gagasan Tan Malaka untuk membuat testamen politik tersebut, tetapi Sukarno tidak akan memilih Tan Malaka sebagai ahli waris tunggal, maka Sukarno merencanakan untuk membentuk empat sekawan ahli waris yang terdiri dari para pemimpin yang mewakili empat kelompok utama pendukung revolusi yaitu, yang pertama Tan Malaka sebagai wakil dari kelompok Marxist kiri yang ekstrim, kedua Sjahrir yang mewakili kaum sosialis moderat, ketiga Iwa Kusuma Sumantri yang mewakili organisasi-organisasi muslim dan yang keempat adalah Wongsonegoro yang mewakili golongan ningrat, pegawai negeri gaya lama.<sup>18</sup>

Dengan terpilihnya empat tokoh pendukung revolusi sebagai ahli waris yang akan memimpin Republik Indonesia apabila terjadi sesuatu terhadap Sukarno-Hatta, maka Sukarno telah menunjukkan bahwa ia tidak akan menjadi seorang pemimpin yang otoriter. Sukarno dipilih sebagai pemimpin Republik Indonesia yang baru berdiri karena dukungan rakyat dan ia juga rela dicap sebagai kolaborator Jepang karena bekerjasama dengan Jepang. Tetapi sebenarnya Sukarno bekerjasama dengan Jepang karena terpaksa, agar Indonesia dapat mencapai cita-cita perjuangan yaitu Indonesia merdeka.

---

<sup>18)</sup>George McT Kahin, *op.cit.*, hal. 188



Sukarno terpaksa bekerjasama dengan Jepang hanya sebagai taktik politiknya saja, tujuan utama yaitu mendukung revolusi untuk mencapai kemerdekaan, tetapi setelah merdeka banyak tuduhan muncul terhadap Sukarno bahwa Sukarno adalah kaki tangan Jepang atau kolaborator Jepang.

Pada akhir September 1945 Sukarno mulai memasukkan tokoh-tokoh pendukung revolusi seperti Sjahrir, Amir Sjarifuddin dan lainnya dalam pemerintahan, sehingga dapat merubah pandangan dunia internasional tentang negara Indonesia yang merdeka atas pemberian Jepang dan pemerintahan yang dipegang oleh para kolaborator Jepang. Indonesia ingin agar dunia internasional mengakui bahwa Republik Indonesia yang baru merdeka ini bukan hadiah dari Jepang, melainkan merupakan hasil dari perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari penjajah yang telah lama menguasainya. Dengan dinyatakannya kemerdekaan Indonesia, maka negara RI harus menentukan nasibnya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara lain.

### **B. Situasi Ekonomi**

Bangsa Indonesia yang merdeka mempunyai cita-cita yaitu menyejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia, agar cita-cita tersebut dapat tercapai, maka pemerintah harus memperhatikan tentang perekonomiannya, karena ekonomi merupakan tulang punggung kemakmuran yang akan menentukan kesejahteraan bangsa dan rakyat, apabila ekonomi negara lemah, maka kemakmuran dan kesejahteraan tidak akan

tercapai. Negara akan selalu tergantung dengan negara lain yang ekonominya lebih mapan.

Perekonomian suatu negara pada umumnya ditentukan oleh tiga hal, yaitu kekayaan tanahnya, lingkungannya terhadap negara lain dalam lingkungan internasional dan yang ketiga adalah sifat, kemampuan dan tujuan rakyatnya. Dalam Indonesia merdeka, perekonomian diatur dalam UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi, (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>19</sup>

Kemajuan ekonomi suatu negara sangat didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pada awal kemerdekaan perekonomian negara RI sangat lemah. Hal ini disebabkan antara lain karena bangsa Indonesia pada waktu itu belum mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Walaupun RI kaya akan sumber daya alam, tetapi tenaga pengolahnya kurang, sehingga sumber alam tidak dapat diolah dengan baik.

Pada saat penjajah menguasai bangsa Indonesia, sumber daya alam banyak yang dikuras untuk kepentingan penjajah, karena bangsa Indonesia belum mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini di

---

<sup>19)</sup> Mavis Rose, *Indonesia Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal. 191.

sebabkan karena kesadaran akan pendidikan masih sangat rendah dikalangan rakyat Indonesia. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas ditentukan oleh tingkat pendidikannya.

Setelah kemerdekaan Indonesia, perekonomian bangsa Indonesia masih kacau, disebabkan oleh pengaruh dari penjajahan Belanda dan Jepang. Kemerosotan ekonomi terjadi terus-menerus sejak jaman pendudukan Jepang sampai Indonesia merdeka. Setelah Jepang kalah dalam perang, maka Jepang meninggalkan kondisi ekonomi yang rusak akibat bencana alam, terkurasnya sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan perang Jepang di Asia Timur Raya. Bencana alam kemarau panjang yang terjadi telah menghancurkan pertanian, sehingga petani mengalami gagal panen, padahal petani diwajibkan untuk menyerahkan sebagian hasil panennya pada pemerintahan Jepang. Keadaan petani semakin miskin, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>20</sup>

Pada awal kemerdekaan kemiskinan semakin meningkat dan kelaparan menyebabkan kematian meningkat. Negara yang baru ini harus menghadapi kondisi ekonomi yang sangat kacau, sehingga pemerintah berusaha keras untuk memperbaiki keadaan ekonomi negara, tetapi keadaan ini juga sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan sehari-hari.

Republik Indonesia mengalami hiper inflasi. Penyebab utamanya adalah masih beredarnya mata uang Jepang secara tak terkendali, di Jawa peredaran mata uang ini mencapai 1,6 milyar, jumlah tersebut masih terus

---

<sup>20)</sup> Ben Anderson, *op.cit.*, hal. 30-31

bertambah sampai pasukan Sekutu mendarat dan menguasai bank-bank yang ada. Pemerintah tidak bisa menghentikan peredaran mata uang Jepang dikalangan rakyat dan menyatakan tidak berlakunya mata uang Jepang, karena pemerintah yang baru belum mempunyai mata uang sendiri.<sup>21</sup>

Keadaan ekonomi semakin parah lagi, karena Republik Indonesia harus membayar hutang luar negeri dan memperbaiki keadaan daerah-daerah yang tergolong miskin, sementara itu pemasukan sangat berkurang. Hal ini disebabkan karena berkurangnya investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang baru berdiri dan kondisi politiknya masih kacau, masih banyak kerusuhan-kerusuhan, sehingga investor asing takut keamanannya tidak terjamin.

Indonesia merupakan negara agraris, sehingga hampir 90% penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Sedangkan perindustrian masih dalam tingkatan yang rendah.<sup>22</sup> Pada awal kemerdekaan masih banyak pabrik-pabrik yang dikuasai oleh Jepang, sehingga sulit bagi pemerintah untuk dapat menjual produksinya sebelum pabrik-pabrik dikuasai oleh pemerintah Republik. Apabila pabrik-pabrik sudah dikuasai oleh pemerintah RI, maka dapat menambah pemasukan dan mengisi kekosongan kas negara. Pemerintah juga belum mampu menguasai sumber-sumber yang menghasilkan uang, karena sebagian masih dikuasai oleh pemerintah Jepang yang masih berada di Indonesia.

---

<sup>21)</sup> Sartono Kartodirdjo, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta : Balai Pustaka, 1997, hal. 172-173.

<sup>22)</sup> Udi Hardjasmita, *Ekonomi dalam Indonesia Merdeka*, dalam Piteyo Darmosugito. *Menjelang Indonesia*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1982, hal. 179.

Keadaan ekonomi semakin terpuruk lagi setelah Sekutu datang, karena ada uang cadangan yang diedarkan oleh bank-bank untuk menggantikan mata uang Jepang dan untuk membiayai pemerintah kolonial Belanda yang akan menanamkan kekuasaannya kembali di Indonesia. Sementara itu adanya inflasi menyebabkan rakyat sangat menderita, terutama bagi para petani, karena pada jaman Pendudukan Jepang petani adalah orang yang selalu menjual hasil panennya dengan harga yang murah pada pemerintah Jepang, sehingga petani mempunyai mata uang Jepang dengan jumlah yang banyak dan dalam kondisi ekonomi yang mengalami inflasi, maka petanilah yang paling menderita.<sup>23</sup>

Keadaan ekonomi RI semakin parah lagi setelah Belanda melakukan blokade laut pada Indonesia. Blokade yang dilakukan Belanda menutup pintu keluar masuk perdagangan RI. Alasan Belanda melakukan blokade ekonomi terhadap RI yaitu yang pertama untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia, kedua mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik negara asing lainnya dan yang ketiga adalah melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia. Dalam hal ini tujuan Belanda melakukan Blokade sangat jelas yaitu suatu usaha untuk mencekik Republik dengan senjata ekonomi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>) Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hal. 172.

<sup>24</sup>) *Ibid.*, hal. 173.

Dengan ditutupnya pintu keluar masuk perdagangan RI, maka keadaan RI semakin parah, karena negara tidak bisa mengimpor barang-barang dari luar negeri yang masih sangat di butuhkan oleh bangsa Indonesia, begitu juga dengan barang-barang Indonesia juga tidak bisa dijual keluar negeri, sehingga tidak ada pemasukan baik dari hasil penjualan maupun dari bea masuk barang-barang luar negeri yang masuk ke Indonesia. Belanda ingin agar Indonesia mengalami kehancuran dalam bidang ekonomi dan akan mempengaruhi keadaan sosial bangsa Indonesia.

### **C. Situasi Sosial Dan Budaya**

Keadaan ekonomi bangsa Indonesia yang kacau sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan yaitu memakmurkan dan menyejahterakan rakyat. Ekonomi Indonesia yang mengalami Inflasi menyebabkan kehidupan rakyat semakin menderita, terutama bagi para petani miskin di daerah-daerah yang kekurangan pangan. Dengan dilakukannya blokade ekonomi oleh Belanda menyebabkan bangsa Indonesia semakin terpuruk, karena Republik Indonesia tidak bisa mengimpor barang-barang dari negara lain terutama barang-barang yang belum bisa dihasilkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Begitu juga sebaliknya, barang-barang Indonesia tidak dapat dijual ke negara lain. Hal ini disebabkan karena ditutupnya pintu keluar masuk perdagangan dengan negara lain.



Pada masa awal kemerdekaan kehidupan masyarakat sangat buruk akibat penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang yang telah merubah semua tradisi dan budaya yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Adanya kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Jepang yaitu secara ketat memperlakukan keharusan memenuhi kebutuhan sendiri di setiap karesidenan, mengakibatkan penderitaan yang parah.

Jepang tidak pernah mempertimbangkan adanya daerah yang minus atau tidak kaya akan sumber alamnya, sehingga mereka harus berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa ada bantuan dari daerah lain yang lebih kaya, akibatnya daerah yang miskin sumber alam penduduknya semakin menderita karena tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri menyebabkan kelaparan melanda daerah tersebut.<sup>25</sup> Keadaan ini terus berlangsung hingga Indonesia merdeka. Pemerintah belum bisa mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan di daerah tertentu, karena ekonomi negara sedang kacau dan ekonomi yang mengalami Inflasi.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang menerapkan program romusha yang mengharuskan setiap keluarga mengirim tenaga kerja, mengakibatkan penderitaan bagi rakyat. Pengaruh yang buruk dari program romusha adalah kemiskinan dan penindasan terhadap yang lemah. Bagi rakyat yang mempunyai kekayaan, mereka mampu membayar orang yang tidak mampu atau miskin untuk menggantikannya sebagai pekerja paksa di luar daerah-daerah mereka sendiri. Dengan jalan ini, maka golongan yang

---

<sup>25)</sup> Ben Anderson, *op.cit.*, hal. 30.



kaya seperti pedagang-pedagang, pejabat kantor, mereka lebih beruntung, sedangkan rakyat miskin penderitaannya semakin berat.<sup>26</sup> Akhirnya dalam masyarakat muncul kelas-kelas sosial dan penindasan oleh golongan yang kaya terhadap golongan yang miskin. Perbedaan-perbedaan kelas menyebabkan munculnya ketegangan dalam masyarakat.

Semangat kerjasama dan kekeluargaan dalam masyarakat pedesaan semakin pudar, berubah menjadi rasa kebencian dan permusuhan antara rakyat dan para pejabat pemerintahan daerah yang pada saat penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang mereka mau diajak kerjasama. Selain itu korupsi dan kesewenang-wenangan para pejabat pemerintah pada rakyat semakin merajalela, mereka tidak pernah memperhatikan nasib para petani miskin yang menjadi korban tindakan mereka, para pejabat pemerintah hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, sehingga pada saat kekuasaan Jepang berakhir, rakyat khususnya para petani di desa-desa mulai mengadakan perlawanan terhadap pejabat pemerintah yang sewenang-wenang.

Pendudukan Jepang ternyata telah memberikan gaya politik Jepang yang merupakan suatu corak baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, Budaya Jepang sedikit demi sedikit telah merasuk dalam masyarakat Indonesia, walaupun Jepang selalu menyesuaikan budaya setempat agar lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.<sup>27</sup>

---

<sup>26)</sup> *Ibid*, hal. 32-33.

<sup>27)</sup> *Ibid*, hal. 54.

Kehidupan sosial bangsa Indonesia semakin buruk, ketika pemerintahan menutup perkebunan-perkebunan ekspor menyebabkan pengangguran. Keadaan ini berlangsung hingga Indonesia merdeka, pengangguran terus meningkat karena banyak pabrik-pabrik yang dikuasai oleh Jepang diambil alih oleh bangsa Indonesia yang pada saat itu belum bisa menghasilkan produksinya, sedangkan pabrik-pabrik yang masih dikuasai oleh Jepang sudah ditinggalkan pemilikinya, maka pabrik berhenti produksi dan diadakan pemberhentian tenaga kerja atau buruh yang terdiri dari orang-orang Indonesia, sehingga pengangguran semakin meningkat.

Pada saat berakhirnya kekuasaan Jepang keadaan semakin menyedihkan, karena kemiskinan dan kelaparan semakin meningkat. Pada awal kemerdekaan terjadi perpindahan penduduk secara besar-besaran dari desa yang miskin sumber alam ke kota-kota besar, mereka terdiri dari para petani miskin dan para buruh pabrik yang sudah diberhentikan.<sup>28</sup> Mereka berharap di kota akan mendapatkan pekerjaan, sehingga kehidupan mereka akan lebih baik dari sebelumnya.

Perpindahan penduduk desa secara besar-besaran tersebut menyebabkan kota menjadi padat penduduknya dan banyak pengangguran. Banyaknya pengangguran mengakibatkan sering terjadi kerusuhan-kerusuhan sosial dan kesulitan yang dialami pemerintah kota dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

---

<sup>28)</sup> *Ibid.*, hal. 32.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, semua lembaga pendidikan dan pemerintahan menggunakan bahasa Jepang sebagai pengantarnya, bendera Merah Putih tidak boleh dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dilarang untuk dinyanyikan, maka pada saat Indonesia merdeka, semua gedung-gedung, sekolah-sekolah, kantor-kantor yang mengibarkan bendera Hinomaru diganti dengan bendera Merah Putih.<sup>29</sup>

Rakyat Indonesia dengan berani menurunkan bendera Jepang di gedung, kantor yang masih dikuasai oleh Jepang, sehingga terjadi bentrokan dengan tentara Jepang. Begitu juga dengan lagu Indonesia Raya yang sejak 17 Agustus 1945 di kumandangkan oleh rakyat Indonesia. Seluruh lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya, menggantikan bahasa Jepang.

Setelah Indonesia merdeka, rakyat merasa terbebas dari belenggu yang selama bertahun-tahun menekannya. Mereka mulai menemukan tradisi-tradisi mereka yang pada saat penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang telah dihilangkan. Di daerah-daerah banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh para petani dan buruh terhadap pejabat-pejabat yang dahulu bekerjasama dengan penjajah. Mereka ingin nasibnya diperhatikan oleh pemerintah dan menuntut agar para pejabat lebih jujur dan meninggalkan kebiasaan korupsi yang sangat merugikan rakyat selama ini.

Demikianlah pembahasan tentang situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada bab-bab

---

<sup>29)</sup> Mohammad Hatta, *op. cit.*, hal. 465.

selanjutnya akan dibahas mengenai Kabinet Bucho, pembentukan dan susunan kabinet, program kabinet dan reaksi masyarakat terhadap kabinet Bucho dalam menjalankan pemerintahan.



## BAB III

### KABINET BUCHO

#### A. Pembentukan dan Susunan Kabinet Bucho

Setelah Indonesia merdeka, maka di bentuk suatu pemerintahan yang di pegang oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa ada campur tangan dari bangsa lain. Republik Indonesia yang baru berdiri ini menganut sistem pemerintahan kabinet Presidensiil, dimana semua kebijakan pemerintahan dipegang oleh presiden, tetapi dalam menjalankan pemerintahannya presiden dibantu oleh menteri-menteri yang semuanya bertanggung jawab pada presiden, sehingga presiden selain sebagai kepala negara dan pemerintahan juga sebagai pimpinan dewan menteri atau sebagai perdana menteri. Dalam hal ini presiden mempunyai wewenang penuh untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, presiden juga berhak memilih menteri yang sesuai dengan kehendaknya untuk membantu menjalankan tugas negara.

Sebelum kabinet pertama RI dibentuk, pemerintah membentuk suatu panitia kecil yang terdiri dari Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo dan Kasman Singodimejo. Panitia kecil ini mempunyai tugas menyusun kementerian-kementerian yang terdiri dari 12 kementerian. Di negara-negara yang sudah maju, biasanya susunan kementerian negara diserahkan kepada presiden, tetapi dalam negara RI presiden menyerahkan kepada suatu Panitia kecil untuk menyusun kementerian negara yang nantinya akan membantu presiden dalam menjalankan tugas negara. Kementerian yang disusun oleh panitia kecil

tersebut baru diisi dan dilantik pada tanggal 31 Agustus 1945 yang dikenal dengan kabinet pertama RI.<sup>1</sup>

Pembentukan kabinet pertama RI ini di ketahui oleh Jepang dan Jepang melarang diadakannya perubahan-perubahan status para pejabat pemerintah, sehingga presiden Sukarno mengangkat orang-orang yang sudah aktif dalam bidang-bidangnya antara lain sebagai Bucho dan Sanyo, tujuannya agar pemindahan kekuasaan bisa berjalan lancar dan aman, karena mereka sudah dikenal baik oleh pejabat-pejabat Jepang. Selain itu mereka sudah berpengalaman dalam kegiatan pemerintahan, sehingga jalannya pemerintahan sehari-hari tidak terganggu.<sup>2</sup>

Kabinet pertama yang baru dibentuk ini oleh golongan yang menentanginya sering disebut sebagai Kabinet Bucho. Dengan sebutan itu seolah-olah yang duduk dalam kabinet tersebut adalah orang-orang Jepang, bukan orang Indonesia. Kabinet Bucho sebenarnya terdiri dari orang-orang Indonesia, tetapi bukan dari pemimpin-pemimpin revolusioner, melainkan terdiri dari orang-orang yang pada jaman pendudukan Jepang mau diajak kerjasama, sehingga kabinet ini lebih terlihat sebagai kabinet buatan Jepang.

Pemerintah Republik Indonesia yang didirikan oleh bangsa Indonesia sendiri, sebenarnya menginginkan agar sebanyak mungkin kekuasaan diserahkan kepada bangsa Indonesia. Menurut gagasan Hatta, untuk mempercepat perebutan kekuasaan dari dalam, maka langkah yang harus

---

<sup>1)</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid I*, Yogyakarta : Kanisius, 1974, hal. 89.

<sup>2)</sup> *Ibid.*, hal. 90.



diambil yaitu, pengangkatan Bucho-Bucho untuk duduk sebagai menteri Republik, sehingga pada umumnya anggota kabinet adalah pegawai tinggi bangsa Indonesia pada pemerintahan militer Jepang, kecuali Ir. Surachman dan Amir Sjarifuddin yang belum pernah menjadi pegawai pemerintah Jepang dan tidak pernah bekerjasama dengan Jepang.<sup>3</sup>

Menteri-menteri yang baru dipilih menjalankan tugas rangkap. Disatu pihak mereka masih menjadi pegawai Jepang yang pada waktu itu masih menjalankan pemerintahan sampai datangnya Sekutu dan penyerahan kekuasaan Jepang kepada Sekutu. dipihak lain mereka telah diangkat menjadi menteri baru dalam RI. Dengan peran rangkap yang dimiliki oleh menteri-menteri, diharapkan saluran dan garis pemerintahan dari atas kebawah dapat dilaksanakan dan lambat laun orang-orang Jepang dapat disisihkan.<sup>4</sup>

Dalam RI ada dua pemerintahan, tetapi perintah yang dipakai untuk mengatur negara adalah perintah dari pemerintah republik yang baru dibentuk. Semua departemen-dapartemen di daerah-daerah tunduk pada pemerintah pusat di Jakarta. Dengan demikian walaupun Jepang masih berada di Indonesia, tetapi Jepang sudah tidak bisa mengendalikan pemerintahan yang telah dipegang oleh orang-orang Indonesia, sehingga sulit bagi Jepang untuk menguasai bangsa Indonesia lagi.

---

<sup>3</sup>) Ben Anderson, *Revoloesi Pemoeda Pendudukan Jepang danPerlawanan di Jawa 1944-1946*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988, hal.134.

<sup>4</sup>) *Ibid*, hal.135.





Kabinet pertama RI telah di bentuk di bawah UUD 1945 yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada presiden. Kabinet pertama ini mempunyai susunan sebagai berikut :

Menteri Dalam Negeri	: R. A. A. Wiranatakusumah.
Menteri Luar Negeri	: Mr. A. Subarjo.
Menteri Kehakiman	: Prof. Mr. Dr. Supomo.
Menteri Kemakmuran	: Ir. R. P. Surachman.
Menteri Keuangan	: Dr. Samsi Sastrowidagdo.
Menteri Kesehatan	: Dr. R. Buntaran Martoatmodjo.
Menteri Pengajaran	: Ki Hadjar Dewantara.
Menteri Sosial	: Mr. Iwa Kusuma Sumantri.
Menteri Pertahanan	: Belum diangkat.
Menteri Penerangan	: Mr. Amir Sjarifuddin.
Menteri Perhubungan	: R. Abikusno Tjokrosujoso.
Menteri-Menteri Negara	: Dr. Amir. : Wachid Hasyim. : Mr. Sartono. : Mr. A. A. Maramis. : Oto Iskandardinata <sup>5</sup> .

Dalam susunan kabinet pertama RI untuk menteri ketahanan masih kosong, tetapi pada tanggal 6 Oktober 1945 lebih dari sebulan sejak pelantikan kabinet ini, jabatan tersebut baru diisi oleh Supriyadi, yaitu pemimpin pemberontakan di Blitar pada bulan Pebruari 1945. Supriyadi tidak dapat langsung duduk dalam kabinet setelah pelantikan, karena Supriyadi tidak pernah muncul lagi setelah pemberontakan itu, banyak orang yang menganggapnya sudah mati, sehingga jabatan menteri pertahanan dibiarkan kosong.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>) Mohammad Hatta, *Memoir*, Jakarta : Tintamas Indonesia, 1978, hal. 463-464, lihat juga Ben Anderson, dalam *Revoloesi Pemoeda*, hal. 133.

<sup>6</sup>) Ben Anderson, *op.cit.*, hal. 134.

Salah satu menteri negara yang tidak pernah bekerjasama dengan Jepang adalah Mr. Amir Sjarifuddin, yang pada waktu pelantikan tidak dapat hadir, karena masih dalam penjara di Malang. Kedudukannya untuk sementara diserahkan kepada Mr. Ali Sastroamijoyo yang pada waktu itu adalah kepala Tabungan Pos. Sedangkan Sukarjo Wirjopranoto yang menjadi penasehat Seindenboo akhirnya menjadi juru bicara kabinet. Mr. A.G. Pringgodigdo bekas sekretaris PPKI menjadi sekretaris negara dan Mr. Gatot menjadi Jaksa Agung.<sup>7)</sup>

Menteri-menteri dalam kabinet pertama RI hampir semuanya telah bekerja pada pemerintahan Jepang. Mereka merupakan pejabat-pejabat tinggi pada saat pemerintahan Jepang berlangsung di Indonesia. Ada dua orang menteri RI yang tidak pernah bekerjasama dengan Jepang yaitu Mr. Amir Sjarifuddin dan Ir. Surachman, mereka merupakan orang baru yang dipilih sebagai menteri RI.<sup>8)</sup>

Tujuan dipilihnya kedua orang tersebut yaitu agar kabinet tidak dicap sebagai kabinet kaum kolaborator. Apabila dilihat dari susunan kementeriannya, maka sangat jelas terlihat bahwa seolah-olah pemerintahan republik yang baru merupakan kelanjutan dari pemerintahan Jepang, karena tidak ada perubahan kedudukan dalam jabatan sebagai menteri pemerintahan. Mereka tetap menduduki posisi seperti pada saat bekerja dalam pemerintahan Jepang.

---

<sup>7)</sup> Soebadio Sastrosatomo, *Perjuangan Revolusi*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hal. 42.

<sup>8)</sup> George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Jakarta : Sebelas Maret University press bekerjasama dengan Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal. 175-176.

Sukarno memilih orang-orang yang sudah bekerja dalam pemerintahan Jepang dengan tujuan agar proses pemindahan kekuasaan bisa berjalan dengan cepat dan lancar ketangan RI dan untuk menghindari adanya pertempuran dengan Jepang yang dikhawatirkan akan memakan banyak korban dan kemenangan belum tentu di pihak RI.

Alasan Sukarno yang lain yaitu apabila Sukarno memilih dan mengangkat orang-orang yang belum berpengalaman dalam pemerintahan, maka pemerintahan sehari-hari tidak akan berjalan lancar, sehingga keadaan akan semakin kacau dan akan memudahkan Jepang untuk menguasai bangsa Indonesia sampai Sekutu datang dan menyerahkannya kepada Belanda.

Berkaitan dengan pembentukan Kabinet Bucho, Hatta mempunyai gagasan bahwa, untuk merebut kekuasaan dari Jepang yang dilakukan dengan jalan membangun suatu alat administrasi pemerintahan nasional yang baru, hanya akan menimbulkan kesulitan dan memperlambat pemindahan kekuasaan ketangan RI, kerana jalan itu menciptakan dua macam administrasi pemerintahan yang saling bersebelahan. Akhirnya administrasi nasional yang baru didirikan tidak dapat bekerja efektif, sedangkan administrasi yang efektif tetap dikuasai Jepang, untuk diserahkan pada Sekutu dan pindah ke kekuasaan Belanda.<sup>9)</sup>

Sikap Sukarno yang lebih lunak terhadap Jepang dan terpaksa bekerjasama dengannya menyebabkan Sukarno dicap sebagai kolaborator Jepang, sehingga kabinet yang dipimpinnya juga dicap sebagai kabinet kaum

---

<sup>9)</sup> Ben Anderson, *op.cit.*, hal. 135.

kolaborator dan orang yang tidak menyukai pembentukan kabinet tersebut, menyebutnya dengan nama kabinet Bucho. Dengan nama tersebut akan lebih terlihat bahwa kabinet itu merupakan kabinet buatan Jepang, sedangkan pemerintah RI hanya kelanjutan dari pemerintah Jepang.

Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan memutuskan untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang anggotanya juga bekas anggota PPKI yang mayoritas terdiri dari politisi nasional, pangreh praja dan pejabat tinggi dalam pemerintahan Jepang.<sup>10</sup>

Setelah terbentuk KNIP, maka anggota-anggota KNI harus segera pulang ke daerah masing-masing untuk melaksanakan tugasnya. Anggota KNI juga merupakan anggota PPKI yang telah bubar yang terdiri dari pangreh praja dari beberapa daerah.<sup>11</sup> Sebelum Kabinet Bucho terbentuk, diadakan konferensi pangreh praja se-Jawa dan Madura di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1945.<sup>12</sup>

Dalam konferensi tersebut, pangreh praja mendukung dan setia pada Republik. pernyataan tersebut sangat mendukung dibentuknya suatu pemerintah sendiri, maka Kabinet Bucho dibentuk dan mendapat dukungan dari rakyat. Hal ini secara tidak langsung merupakan peranan PPKI dalam pembentukan Kabinet Bucho.

Setelah kabinet pertama RI terbentuk, maka banyak dukungan dan tentangan dari kalangan rakyat Indonesia. Dukungan terhadap kabinet Bucho

---

<sup>10)</sup> *Ibid.*, hal. 122.

<sup>11)</sup> Mohammad Hatta, *op.cit.*, hal. 459.

<sup>12)</sup> Ben Anderson, *op.cit.*, hal. 136.

muncul dari kalangan pegawai pemerintah, mereka sangat mendukung dibentuknya kabinet RI, sehingga dapat menyingkirkan orang-orang Jepang, karena dalam kabinet yang baru itu terdiri dari orang-orang Indonesia yang sudah berpengalaman dalam bidang pemerintahan.<sup>13</sup>

Dukungan yang kedua muncul dari rakyat Indonesia pada umumnya, mereka hanya menginginkan Sukarno yang memegang pimpinan pemerintahan. Bagi mereka kemerdekaan RI tidak dapat lepas dari Sukarno mereka tidak pernah mempedulikan sikap politik Sukarno yang mau bekerjasama dengan Jepang, mereka hanya mengetahui bahwa tanpa Sukarno-Hatta kemerdekaan belum tentu terwujud.

Besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap Sukarno, membuat Sukarno lebih percaya diri dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan kelompok-kelompok yang menentang pembentukan kabinet tersebut antara lain, kelompok yang dipimpin oleh Sjahrir dan kelompok yang dipimpin oleh Tan Malaka.

Kelompok Sjahrir dan Tan Malaka tidak menyetujui pembentukan kabinet yang terdiri dari orang-orang yang pada masa pemerintahan Jepang mau diajak bekerjasama, mereka menginginkan agar pemerintahan terdiri dari kaum nasionalis yang anti penjajah Belanda dan Jepang. Sjahrir dan kelompoknya menolak ajakan Sukarno untuk menduduki jabatan penting dalam kabinet, Sjahrir mengambil sikap untuk tetap menjauhkan diri dari kabinet RI yang dianggapnya sebagai kabinet kaum kolaborator. Akan tetapi

---

<sup>13)</sup> *Ibid.*, hal. 176.



dua pemimpin kuat lainnya, Subardjo dan Tan Malaka, sangat berambisi menduduki kedudukan teratas dalam Republik itu.<sup>14</sup>

Sikap Sjahrir yang tidak mau bergabung dalam kabinet RI akhirnya dapat berubah, setelah Sjahrir melihat dan memahami tentang sikap rakyat Indonesia yang sangat mendukung proklamasi kemerdekaan yang diperoleh melalui perjuangan yang panjang oleh bangsa Indonesia, rakyat juga memandang bahwa Sukarno adalah pemimpin mereka yang harus dipatuhi, maka Sjahrir merubah sikapnya dan mau bergabung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, tetapi Sjahrir tetap tidak mau duduk dalam kabinet.

KNIP mengadakan sidang yang memutuskan untuk meminta Sjahrir dan Amir Sjarifuddin menjadi pimpinan KNIP sekaligus melaksanakan maklumat wakil presiden No. X yang diterima sebelumnya menjadi formatur untuk membentuk Badan Pekerja. Setelah sidang selesai dan Sjahrir terpilih menjadi ketua Badan Pekerja tersebut, maka disusunlah suatu daftar Badan Pekerja yang terdiri dari 15 orang anggota.<sup>15</sup> Dengan ikutsertanya kaum nasionalis yang revolusioner seperti Sjahrir dan Amir Sjarifuddin ini akan merubah pandangan dunia Internasional tentang RI yang lebih dikenal sebagai buatan Jepang.

Setelah kabinet presidensiil yang dipimpin oleh Sukarno dilantik, maka kabinet mulai menjalankan tugasnya untuk membantu presiden dalam

---

<sup>14)</sup> *Ibid.*, hal. 185.

<sup>15)</sup> Soebadio Satrosatomo, *op. cit.* hal. 65.

menjalankan pemerintahannya. Kabinet ini berusaha untuk memperbaiki keadaan RI yang masih kacau akibat penjajahan Belanda dan Jepang. Dalam menjalankan tugasnya, menteri-menteri seolah-olah mempunyai tugas rangkap yaitu sebagai pegawai pemerintahan Jepang dan sebagai menteri baru Republik yang baru saja dilantik. Walaupun Indonesia sudah berdiri, tetapi Jepang masih memegang kekuasaannya untuk tetap menjaga status quo di Indonesia.

Kedudukan menteri-menteri hampir sama dengan pada saat mereka duduk dalam pemerintahan militer Jepang, hanya saja mereka tidak lagi mendapat perintah dari Jepang, melainkan dari pemerintahan RI, sehingga untuk menghindari kesalahan terutama dalam lembaga pemerintahan di daerah-daerah, Sukarno membuat sebuah Dekrit yang isinya mengumumkan kepada seluruh pegawai-pegawai Republik Indonesia untuk tidak menerima perintah dari orang Jepang, tetapi mereka hanya patuh pada perintah pemerintah Republik saja.<sup>16</sup>

Kabinet pertama RI yang sering disebut dengan kabinet Bucho, walaupun pembentukannya mendapat tentangan yang keras terutama dari kelompok nasionalis yang revolusioner, tetapi kabinet tersebut tetap menjalankan tugasnya dan berusaha memperbaiki keadaan RI yang baru berdiri ini.

Sukarno sebagai pemimpin kabinet tersebut merasa yakin dan lebih percaya diri dalam menjalankan pemerintahan dengan dibantu oleh

---

<sup>16)</sup> George Mc T Kahin, *op. cit.* hal. 176.



kabinetnya, karena rakyat Indonesia secara umum sangat mendukung kepemimpinan Sukarno. Kepercayaan yang diberikan oleh rakyat akan sangat berarti bagi Sukarno, walaupun banyak yang menganggap Sukarno sebagai seorang kolaborator Jepang, tetapi rakyat Indonesia secara umum tidak memedulikannya, mereka hanya mengakui bahwa Sukarno sebagai pemimpin mereka yang harus dipatuhi, karena tanpa Suakarno-Hatta bangsa Indonesia belum tentu akan mencapai kemerdekaan yang sudah sekian lama ditunggu-tunggu oleh bangsa Indoensia.

### **B. Program Kabinet Bucho dan Pelaksanaannya**

Setelah Negara Republik Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka harus dibentuk suatu pemerintahan yang berdiri sendiri tanpa campur tangan bangsa asing untuk mengatur negaranya. Presiden sebagai kepala negara mempunyai tugas yang sangat berat, sehingga perlu dibentuk suatu dewan menteri yang akan membantu melaksanakan tugas presiden. Kementerian disusun oleh suatu Panitia kecil dan pada tanggal 31 Agustus 1945 kabinet pertama Republik Indonesia resmi dilantik dengan dipimpin langsung oleh Sukarno. Dalam Republik Indonesia yang menganut sistem pemerintahan kabinet presidensiil ini, presiden mempunyai jabatan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan sebagai perdana menteri yang memimpin kabinet tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya kabinet Bucho tidak mengumumkan program-programnya kepada rakyat Indonesia.<sup>17</sup> Hal ini disebabkan karena, kondisi Indonesia yang baru merdeka dengan pemerintahan darurat dalam masa transisi dari pemerintah militer Jepang, menjadi pemerintah Republik Indonesia, sehingga program-program kabinet disesuaikan dengan keadaan negara yang baru merdeka ini. Setiap menteri mempunyai tugas sesuai dengan bidangnya.

### 1. Dalam bidang keamanan

Pemerintah Republik Indonesia merasa perlu membentuk organisasi militer atau tentara yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, pemerintah berusaha menghapus semua organisasi yang dibentuk oleh pemerintah militer Jepang, termasuk organisasi militer. PETA yang merupakan organisasi militer buatan Jepang telah dibubarkan dan diganti dengan BKR (Barisan Keamanan Rakyat) yang berada dibawah Komite Nasional di daerah-daerah, sehingga pemerintah pusat sulit untuk memimpin mereka.

Menjelang akhir September 1945, kabinet yang dipimpin Sukarno merencanakan untuk mengganti BKR dengan TKR, karena BKR dirasakan kurang efektif dan berguna, selain itu ketidakpastian mengenai status mereka (anggota BKR) sebagai polisi atau kesatuan-kesatuan militer

---

<sup>17)</sup> Naskah Departemen Penerangan, *Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia selama 25 tahun 1945 – 1970*, Jakarta: Pradnja Paramita, 1970, hal.3.

telah menyebabkan semangat mereka melemah dan menimbulkan ketegangan-ketegangan dengan pemimpin-pemimpin sipil yang resmi menjadi atasannya. Selain itu banyak senjata Jepang yang mengalir ketangan pemuda yang kebanyakan bukan anggota BKR. Dengan alasan tersebut Sukarno mengganti BKR dengan organisasi yang lebih hierarkis dan langsung dalam pengawasannya. Pada tanggal 5 Oktober 1945, Sukarno menandatangani suatu pengumuman resmi mengenai pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat).<sup>18</sup>

Tentara Keamanan Rakyat (TKR) merupakan tentara kebangsaan yang dibawahkan oleh pemerintah pusat. TKR dibagi menjadi TKR darat, TKR laut dan TKR udara yang diharapkan akan mampu menopang pemerintah dengan semua kebijakannya. Pada tanggal 14 Oktober 1945, pemerintah mengangkat Urip Sumoharjo sebagai kepala Staf Umum Angkatan Perang yang mempunyai tugas menyusun TKR dan rencana pengembangannya.<sup>19</sup>

## 2. Bidang Ekonomi

Keadaan ekonomi Republik Indonesia setelah merdeka masih sangat lemah, pemerintah berusaha untuk memperbaiki keadaan tersebut. Pangkal Pokok perekonomian Republik Indonesia yaitu pertanian, 90 % dari penduduk Indonesia mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Pemerintah mengadakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan

---

<sup>18)</sup> Ben Anderson. *op.cit.*, hal. 261.

<sup>19)</sup> Moedjanto, *op.cit.*, hal. 120-121.

dalam pertanian dan juga dalam lapangan perindustrian, dengan cara membentuk badan-badan atau kantor-kantor yang akan memberikan penyuluhan kepada rakyat.<sup>20</sup>

Pemerintah berusaha memperluas produksi di luar pulau Jawa, tetapi pemerintah mengalami kesulitan, karena kekurangan tenaga kerja, sedangkan transmigrasi secara besar-besaran tidak dapat dilakukan. Pemerintah juga meningkatkan irigasi di daerah pertanian di pulau Jawa dan membagikan tanah yang tidak produktif usahanya kepada rakyat jelata yang tidak mempunyai tanah untuk diolah kembali sebagai penghidupan mereka.<sup>21</sup> Tujuan pemerintah memperluas produksi yaitu agar kehidupan rakyat lebih meningkat lagi terutama rakyat miskin. Selain itu juga untuk menambah pendapatan negara.

Untuk masalah keuangan, pemerintah telah dapat mencetak uang sendiri, sehingga dapat menggantikan mata uang Jepang yang banyak beredar dalam masyarakat Indonesia. Usaha pemerintah untuk menarik mata uang Jepang yang beredar dalam masyarakat yaitu dengan cara mendirikan sebuah Bank Sirkulasi yang diberi nama Bank Indonesia yang mempunyai hak mengeluarkan uang dan memonopolinya. Semua uang kertas yang beredar, baik uang kertas Hindia Belanda dan uang kertas Jepang ditukar dengan uang kertas Indonesia,<sup>22</sup> sehingga uang Jepang dan

---

<sup>20)</sup> Udi Hardjasasmita, *Ekonomi dalam Indonesia Merdeka*, dalam Pitoyo Darmosugito, *Menjelang Indonesia Merdeka*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1982, hal.179.

<sup>21)</sup> Saafroedin Bahar dkk, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995, hal. 390.

<sup>22)</sup> *Ibid*, hal.393.

Belanda yang beredar pada masa penjajahan hingga pada awal kemerdekaan sedikit demi sedikit dapat ditarik oleh pemerintah.

### 3. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan pada jaman penjajahan Belanda dan Jepang diatur oleh pemerintahan penjajah. Pada masa pemerintahan Jepang di sekolah-sekolah diajarkan bahasa dan kebudayaan Jepang. Setelah Republik Indonesia merdeka, maka usaha pemerintah untuk memelihara pendidikan dan mencerdaskan rakyat Indonesia dengan cara membuat Undang-Undang Kewajiban Belajar. Pendidikan dan pengajaran nasional berdasarkan pada agama dan kebudayaan bangsa sendiri, untuk mempertinggi derajat bangsa Indonesia.

### **C. Reaksi Masyarakat terhadap Kabinet Bucho dalam Menjalankan Pemerintahan**

Pada pertengahan bulan September 1945, rakyat Indonesia mulai merasakan bahwa kabinet Bucho dalam menjalankan pemerintahan terlalu lemah atau bersikap tidak tegas terutama dalam mengatasi kekuasaan asing yang masih berkuasa di RI, sehingga menyebabkan adanya dua kekuasaan dalam satu negara. Selain itu kabinet tidak dapat mengubah keadaan Republik Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya, karena pemerintah Republik yang baru berdiri ini masih bersikap hati-hati terhadap Jepang dan tidak tegas untuk mengusirnya. Jepang juga merasa masih memiliki hak untuk berkuasa di RI, untuk menjaga status quonya sampai Sekutu datang.

Kabinet yang dipimpin oleh Sukarno sebagian besar menteri-menterinya terdiri dari orang-orang yang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang sebagai pejabat tinggi dalam pemerintahan, sehingga mereka tidak bersikap sebagai seorang menteri Republik yang baru, melainkan masih tetap sebagai pegawai Jepang. Dengan demikian mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka merasa berhutang budi terhadap Jepang.<sup>23</sup> Berkat pemerintah Jepang, mereka mempunyai kedudukan yang tinggi dan sampai dengan Indonesia merdeka kedudukan mereka masih tetap sama, hanya saja mereka telah berganti nama menjadi menteri Republik Indonesia yang baru.

Dengan situasi Indonesia yang sudah merdeka, mereka harus lebih mendukung perjuangan para pemuda untuk menegakkan kemerdekaan dan mengusir penjajah asing dari Republik, termasuk Jepang. Tetapi pada kenyataannya menteri-menteri dalam kabinet tidak mampu berbuat apa-apa, mereka tetap tidak bisa berbuat tegas terhadap Jepang. Situasi ini menyebabkan munculnya perasaan tidak puas dikalangan rakyat Indonesia, terutama rakyat dan para pemuda yang berada di Jakarta, karena mereka yang lebih dekat dengan pemerintah pusat, sehingga mengetahui dengan jelas perkembangan politik di Jakarta.

Rakyat dan pemuda di Jakarta juga lebih tinggi kesadaran politiknya, sehingga reaksi yang muncul terhadap kabinet Bucho diawali oleh para pemuda dan rakyat yang berada di Jakarta. Sedangkan para pemuda dan rakyat

---

<sup>23)</sup> Abu Bakar Lubis, *Kilas Balik Revolusi, Kenangan, Pelaku, Saksi*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992. hal.103.



di daerah-daerah tidak pernah menentang pemerintah, karena pemerintah Jepang yang masih berkuasa di daerah-daerah cepat diambil alih oleh bangsa Indonesia. Mereka juga kurang memperhatikan sikap yang lemah dan kurang tegas pemerintah pusat terhadap kekuasaan Jepang, mereka hanya mematuhi pimpinannya yang pada masa perang menjadi pemimpin dalam perjuangan merebut kemerdekaan.

Rakyat dan pemuda di Jakarta lebih berani menentang kabinet yang dipimpin oleh Sukarno. Ketidakpuasan rakyat Indonesia diwujudkan dalam aksi protes atau demonstrasi yang menuntut agar pemerintah mengambil tindakan yang tegas terhadap kekuasaan asing yang berada di RI, sehingga negara Indonesia benar-benar terlepas dari campur tangan asing.

Ketidakpuasan rakyat dan pemuda khususnya di Jakarta diluapkan dalam demonstrasi besar-besaran yang dilaksanakan di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945. Dalam demonstrasi tersebut, Sukarno-Hatta dan para menteri dalam kabinet hadir untuk memberi penjelasan kepada rakyat bahwa pemerintah RI akan berjuang untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pemerintah juga meminta agar rakyat percaya pada pemerintah serta patuh pada peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah.<sup>24</sup> Berkat kewibawaan Sukarno yang besar di mata rakyat, akhirnya demokrasi tersebut dapat dibubarkan, tetapi kekecewaan masih ada terhadap pemerintah.

---

<sup>24</sup>) Ben Anderson, *op. cit.*, hal. 146-147

Demikianlah pembahasan tentang pembentukan kabinet Bucho, program kabinet dan reaksi masyarakat terhadap kabinet Bucho dalam menjalankan pemerintahan. Pada bab selanjutnya akan dibahas mengenai sebab-sebab jatuhnya kabinet Bucho dan dampaknya bagi pemerintah serta bangsa Indonesia.



## BAB IV

### JATUHNYA KABINET BUCHO

#### A. Sebab-sebab Jatuhnya Kabinet Bucho

Pada tanggal 31 Agustus 1945 kabinet Republik Indonesia dilantik, maka kabinet tersebut sudah mulai melaksanakan tugasnya yaitu untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Sampai pada bulan Oktober dan November 1945 keadaan bangsa Indonesia masih sangat kacau, kabinet yang dipimpin Sukarno belum bisa mengubah keadaan Republik Indonesia menjadi lebih baik. Kedatangan pasukan sekutu untuk melucuti tentara Jepang dan menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang membuat pemerintahan Republik Indonesia semakin sulit mengatasi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi.<sup>1</sup>

Keadaan ekonomi yang mengalami kemunduran masih belum ada perubahan kearah yang lebih baik. Keadaan sosial yang masih kacau juga belum bisa diatasi oleh pemerintah Republik Indonesia yang baru saja berdiri ini. Masalah-masalah yang ada akibat penjajahan Belanda dan Jepang belum dapat diselesaikan, tetapi muncul persoalan baru yaitu datangnya pasukan Sekutu yang ternyata diboncengi oleh pasukan tentara Belanda dan pejabat NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yang ingin menguasai Indonesia lagi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>) Ben Anderson, *Revoloesi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988, hal. 195 dan 198.

<sup>2</sup>) *Ibid.*, hal. 145.

Pada mulanya pemerintah Republik menerima kedatangan sekutu dengan tujuan yang sudah jelas yaitu tidak akan mencampuri urusan negara RI, mereka hanya diberi tugas untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang, akan tetapi keadaan menjadi tegang setelah rakyat Indonesia mengetahui bahwa ada pasukan tentara Belanda yang ingin menguasai Republik Indonesia dengan berlindung dibawah pasukan Sekutu. Hal ini menimbulkan ketegangan dikalangan rakyat Indonesia yang menyebabkan terjadinya bentrokan-bentrokan antara rakyat Indonesia dengan tentara Sekutu yang didalamnya juga terdapat tentara Belanda.<sup>3</sup>

Pemerintah tidak dapat mengatasi bentrokan antara rakyat Indonesia dan Sekutu, karena semangat berjuang mengusir penjajah dari rakyat Indonesia sangat tinggi, sehingga sulit bagi pemerintah untuk mencegah bentrokan yang terjadi. Bentrokan antara rakyat Indonesia dengan pasukan Sekutu terjadi tidak hanya di ibu kota saja, melainkan hampir di seluruh kota-kota di Indonesia.

Di berbagai daerah juga terjadi krisis dalam masyarakat yaitu kemiskinan dan kelaparan melanda daerah yang miskin akan sumber alam. Dalam usaha memecahkan persoalan tersebut, pemerintah tidak banyak berbuat sesuatu. Hal ini disebabkan karena banyaknya masalah yang harus dihadapi. Melihat kenyataan bahwa pemerintah pusat tidak mampu berbuat sesuatu, maka rakyat semakin bebas melakukan tindakan-tindakan sesuai

---

<sup>3)</sup> George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, Jakarta : Sebelas Maret University Press bekerjasama dengan Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal. 182.

kehendaknya, banyak pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan di daerah-daerah diambil alih oleh pemuda dan rakyat tanpa pemerintah pusat bisa mengontrolnya, banyak juga pejabat pangreh praja yang dipaksa berhenti dan diganti oleh pejabat yang dipilih dan dikehendaki oleh rakyat.<sup>4</sup>

Pemerintah Sukarno-Hatta harus menghindari permusuhan dan berhati-hati terhadap Sekutu, karena pada saat itu Republik Indonesia baru berdiri, sehingga masih lemah dan sangat membutuhkan dukungan dari dunia internasional, terutama dari negara-negara yang menang dalam Perang Dunia II (Sekutu), selain itu RI juga ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan yang dicapai merupakan hasil dari perjuangan rakyat Indonesia sendiri, bukan merupakan pemberian Jepang, rakyat sudah cukup kuat untuk memerintah sendiri.<sup>5</sup>

Pemerintah berhasil menjalin hubungan baik dengan pihak Sekutu, tetapi pemerintah tidak dapat menghentikan semangat perjuangan rakyat untuk mengusir semua bangsa asing yang ingin menguasainya lagi, sehingga masih tetap terjadi perlawanan rakyat terhadap Sekutu dan Belanda.

Rakyat Indonesia secara umum terutama yang berada di luar ibu kota memang mendukung pemerintahan Sukarno, tetapi mereka kebanyakan hanya memandang sosok Sukarno dan Hatta sebagai pemimpin perjuangan mereka saja, mereka tidak peduli dengan sikap yang diambil Sukarno dan kabinetnya dalam menjalankan pemerintahan, tetapi pemuda dan rakyat yang berada di

---

<sup>4</sup>G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20. Jilid 1*, Yogyakarta : Kanisius, 1974, hal 141.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal 102.

ibu kota sangat kecewa dan tidak puas dengan sikap tidak tegas pemerintah terhadap Jepang yang masih menduduki RI.

Ketidakpuasan rakyat dari berbagai golongan terutama di Jakarta diwujudkan dalam rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945 yang menuntut agar pemerintah Republik bersikap tegas terhadap Jepang. Pemerintah Pusat selama ini terlihat sangat lemah, sehingga di Jakarta banyak rakyat dan pemuda yang tidak puas dengan pemerintah. Ketidakpuasan ini sampai menimbulkan gagasan untuk mengganti kabinet Sukarno-Hatta dengan kabinet baru yang dapat menghadapi situasi yang sulit itu secara lebih tegas dan berani.<sup>6</sup>

Pada tanggal 1 September 1945, didirikan API (Ankatan Pemuda Indonesia) yang bermarkas di Menteng 31, sebagai ketuanya Wikana dan wakil ketua Chairul Saleh. Selain itu juga dibentuk Barisan Buruh dan Barisan Rakyat, ketiganya bernaung dibawah Komite Aksi.<sup>7</sup> Golongan pemuda yang tergabung dalam API menuntut agar pemerintah yang dipimpin oleh Sukarno-Hatta secepatnya mengambil tindakan yang nyata untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan pemerintah Jepang dan harus bersikap tegas terhadap Sekutu yang didalamnya juga terdapat NICA.

Dari awal pembentukan kabinet Republik Indonesia pertama atau kabinet Bucho ini sudah mendapat tentangan yang keras dari kelompok nasionalis yang revolusioner. Tentangan yang keras muncul terutama dari

---

<sup>6)</sup> *Ibid.*, hal. 142.

<sup>7)</sup> Soebadio Sastrosatomo, *Perjuangan Revolusi*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987, hal. 47.



kelompok nasionalis bawah tanah yang dipimpin oleh Sjahrir. Sjahrir dan kelompoknya menentang keras pembentukan kabinet tersebut, karena mereka menganggap kabinet Republik Indonesia itu tidak lain adalah kabinet buatan Jepang sehingga didalamnya juga terdiri dari orang-orang Indonesia yang mau diajak bekerjasama dengan Jepang, bahkan mereka merupakan pegawai tinggi dalam pemerintahan Jepang.<sup>8</sup>

Dengan susunan kabinet dan posisi jabatan yang hampir sama dengan posisi jabatan pada waktu pemerintahan Jepang, membuat semakin jelas terlihat bahwa pemerintahan Republik Indonesia yang baru seolah-olah hanya melanjutkan pemerintahan yang dulu. Orang-orang yang duduk dalam pemerintahan dan posisinya masih tetap sama, hanya namanya telah diganti yaitu bukan sebagai pegawai tinggi pemerintah Jepang, melainkan sebagai menteri Republik Indonesia.

Ada sedikit perubahan yang akan memperlihatkan pemerintahan Republik yang baru yaitu dimasukkannya beberapa tokoh nasionalis yang tidak pernah bekerjasama dengan Jepang, antara lain Amir Sjarifuddin dan Ir. Surachman, mereka dipilih sebagai menteri Republik untuk mewakili golongan yang anti penjajahan Belanda dan Jepang. Dengan dimasukkannya orang-orang yang tidak pernah bekerjasama dengan Jepang tersebut, akan merubah pandangan rakyat Indonesia dan dunia internasional mengenai kabinet pertama yang dikenal sebagai kabinet kaum kolaborator Jepang.

---

<sup>8)</sup> Ben Anderson, *op. cit*, hal. 221.

Kabinet yang dipimpin Sukarno-Hatta ternyata tidak memberi perubahan yang lebih baik dalam kehidupan rakyat. Keadaan Republik Indonesia masih sangat kacau, perekonomian semakin menurun menyebabkan kemiskinan dan kelaparan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan banyak kritik muncul terhadap kabinet Bucho. Kritik yang sangat pedas muncul dari Sutan Sjahrir.

Sjahrir mengemukakan bahwa kabinet terdiri dari orang-orang tanpa karakter sesungguhnya dan kebanyakan diantara mereka sangat terbiasa menjilat dan mematuhi pemerintah Belanda dan Jepang. Lebih jauh lagi Sjahrir menuduh secara psikologis mereka plin-plan dan terbukti sangat tidak mampu bertindak tegas serta memikul tanggung jawab, sehingga kabinet tidak akan mampu menyalurkan aspirasi rakyat Indonesia.<sup>9</sup>

Pada tanggal 10 November 1945, Kementerian Penerangan mengumumkan diterbitkannya suatu pamphlet politik yang ditulis oleh Sjahrir dengan judul *Perdjoeangan Kita*. Isi pokok pamphlet tersebut yaitu uraian secara singkat tentang kehidupan pahit yang dialami oleh rakyat Indonesia pada jaman pendudukan Jepang yang menerapkan kerja paksa, penyerahan padi secara paksa, pelanggaran hukum, korupsi yang semakin merajalela dan kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah militer Jepang terhadap bangsa Indonesia. Sjahrir juga mengemukakan konsekuensi yang harus diterima bangsa Indonesia akibat pendudukan Jepang yaitu bangkitnya sejumlah besar nasionalis yang dianggap telah menjual diri kepada Jepang

---

<sup>9)</sup> Mavis Rose, *Indonesia Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta*. Jakarta : PT. Gramedia pustaka Utama, 1991, hal. 211.

dan adanya peracunan terhadap pemuda Indonesia dengan sikap militeristis dan facis yang dilakukan melalui berbagai organisasi yang didirikan Jepang. Sjahrir menyerukan agar unsur-unsur kolaborator dibersihkan dan berusaha untuk membantu pengembangan prinsip-prinsip sosialisme kemanusiaan didalam pikiran pemuda Indonesia.<sup>10</sup>

Dalam pamphlet *Perdjoeangan Kita*, Sjahrir secara terbuka dan dengan keras menyerang kabinet Bucho dengan mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia dikendalikan oleh orang-orang yang berjiwa lemah, mereka kebanyakan terlalu tunduk kepada Belanda dan Jepang serta mau diajak kerjasama. Mereka merasa banyak diuntungkan dan merasa berhutang budi kepada Jepang, sehingga pada saat kekuasaan Jepang runtuh dan Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya serta membentuk pemerintahan, maka sikap pemerintah sangat lemah terhadap Jepang karena orang-orang yang duduk dalam pemerintahan adalah orang-orang yang dulu bekerjasama dengan Jepang. Sikap pemerintah Republik Indonesia yang tidak tegas terhadap Jepang menimbulkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah, sehingga muncul kekacauan-kekacauan, pembunuhan terhadap bangsa asing dan perampokan dalam masyarakat. Dengan keadaan tersebut telah memperlihatkan kelemahan pemerintahan Republik Indonesia yang belum dapat merasakan sebagai pemerintah yang dipandang dan dihormati oleh rakyatnya.<sup>11</sup>

---

<sup>10)</sup> Ben Anderson, *op. cit.*, hal. 219.

<sup>11)</sup> *Ibid.*, hal. 221

Dengan munculnya pamphlet *Perdjoeangan Kita* yang ditulis oleh Sjahrir menyebabkan kedudukan kabinet semakin menurun, karena banyak rakyat Indonesia terutama pemuda pendukung Sjahrir menuntut agar diadakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan dan mengganti sistem kabinet presidensiil dengan sistem kabinet parlementer yang diharapkan akan mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya.<sup>12</sup>

Kabinet Bucho semakin terpuruk lagi kedudukannya, karena kabinet tidak mendapat dukungan dari golongan revolusioner seperti misalnya golongan Tan Malaka yang ingin menggeser kedudukan Sukarno-Hatta. Pendukung Tan Malaka menginginkan agar Tan Malaka menggantikan kedudukan Sukarno.<sup>13</sup> Ketidakpuasan rakyat terutama mereka yang berada di Jakarta sangat mengganggu kelancaran jalannya pemerintahan, karena mereka melakukan aksi protes terhadap kabinet yang dianggap tidak bisa mengatasi berbagai masalah yang muncul, sehingga menyebabkan kehidupan rakyat tetap menderita.

Dalam pertengahan bulan Oktober 1945, nama Sjahrir semakin melambung. Hal ini disebabkan karena pada tanggal 16 Oktober 1945 KNIP mengadakan sidang. Hasil sidang KNIP yaitu dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X yang isinya mengubah status KNIP dari badan pembantu presiden, menjadi badan legislatif dan pembentukan sebuah Badan Pekerja yang bertugas mengerjakan tugas sehari-hari pekerjaan KNIP.<sup>14</sup>

---

<sup>12)</sup> Moedjanto, *op. cit.*, hal. 144.

<sup>13)</sup> Mavis Rose, *op. cit.*, hal. 214.

<sup>14)</sup> *Ibid.*, hal. 217.

Pada tanggal 17 Oktober 1945, diadakan sidang KNIP lagi, karena muncul mosi-mosi tidak percaya dari pemuda dan mahasiswa kepada pemerintah Republik, mereka mengecam pemerintah, karena dianggap kurang tegas dalam menghadapi kekuasaan Jepang dan kurangnya hubungan dengan yang erat dengan rakyat.

Dalam sidang KNIP tersebut, dimulai dengan membicarakan tentang mosi Sukarni yang menuntut suatu perubahan radikal dalam pimpinan KNIP untuk meningkatkan perjuangan RI. Rakyat revolusioner juga memerlukan pimpinan yang revolusioner dan pimpinan KNIP harus selaras dengan kemauan rakyat dan pemuda.<sup>15</sup> Akhirnya sidang KNIP memutuskan untuk meminta Sjahrir dan Amir Sjarifuddin menjadi formatur untuk membentuk Badan Pekerja KNIP, sekaligus melaksanakan Maklumat Wakil Presiden tersebut.

Maklumat wakil presiden tersebut membawa Sjahrir menjadi ketua Badan Pekerja KNIP dan sebagai wakilnya adalah Amir Sjarifuddin yang merupakan teman seperjuangan Sjahrir. Sebagai ketua Badan Pekerja Sjahrir mendapat dukungan yang besar dari para pemuda, terutama kelompok sjahrir. Langkah yang harus dilakukan agar keinginannya mengubah sistem kabinet presidensiil menjadi sistem kabinet parlementer tercapai, maka Sjahrir mengusulkan agar Republik Indonesia menganut sistem multi partai,

---

<sup>15</sup> Ben Anderson, *op.cit.*, hal. 202, lihat juga Soebadio Sastrosatomo dalam *Perjuangan Revolusi*, hal. 64.



sehingga rakyat bebas menyalurkan aspirasinya melalui partai-partai yang mereka kehendaki dan penyelenggaraan suatu pemilihan untuk memilih anggota MPR-DPR.<sup>16</sup>

Sjahrir menjelaskan bahwa pemilihan itu akan bersifat demokratis dan sebagai konsekuensi dari pemilu yaitu keikutsertaan partai politik. Gagasan Sjahrir itu mendapat dukungan yang besar, sehingga Sjahrir memperoleh persetujuan dari BP-KNIP untuk mengeluarkan maklumat pendirian partai-partai. Pada saat Sjahrir membuat rencana maklumat pendirian partai-partai tersebut, Sukarno-Hatta tidak berada di Jakarta, tetapi pada saat mereka kembali ke Jakarta, mereka menyetujui isi maklumat tersebut dan disahkan pada tanggal 3 November 1945.<sup>17</sup>

Kesempatan Sjahrir dan kelompoknya untuk mengubah sistem kabinet presidensiil menjadi sistem kabinet parlementer semakin terbuka. Langkah-langkah kearah terbentuknya sistem kabinet parlementer sudah dilakukannya, yaitu yang pertama dengan mengubah status KNIP menjadi sebuah Badan Perwakilan Rakyat, sehingga kekuasaan presiden dapat diawasi oleh badan tersebut, karena badan tersebut merupakan penjelmaan dari rakyat Indonesia. Langkah yang kedua yaitu mengubah sistem partai tunggal menjadi multi partai. Dengan diubahnya sistem ini, maka rakyat tidak hanya memilih satu

---

<sup>16)</sup> George McT Kahin, *op.cit.*, hal.186

<sup>17)</sup> Moedjanto, *op.cit.*, hal. 144





partai saja, tetapi dapat menyalurkan aspirasinya melalui salah satu partai yang mereka kehendaki.<sup>18</sup>

Pada permulaan bulan Oktober 1945, semua anggota KNIP mulai mengerjakan suatu rencana untuk mengubah sistem kabinet presidensiil menjadi sistem kabinet parlementer dengan kekuasaan legislatif berada di tangan KNIP. Mereka merencanakan untuk mengajukan veto tidak percaya kepada kabinet, kemudian mereka memilih Sjahrir menjadi formatur kabinet yang baru dan menjadi Perdana Menteri.<sup>19</sup>

Penyebab jatuhnya kabinet Bucho, antara lain disebabkan karena munculnya kritik yang dilakukan oleh Sjahrir dan pendukungnya. Selain itu kabinet Bucho pada bulan Oktober dan November kedudukannya semakin menurun akibat tidak ada dukungan dari para pemuda dan kelompok revolusioner lainnya, seperti kelompok yang dipimpin oleh Tan Malaka.

Kelompok Tan Malaka tidak mau bergabung dalam pemerintahan, tetapi mereka juga tidak mau mendukung pemerintah, sehingga menyebabkan kedudukan kabinet semakin merosot. Sebab lain yang menyebabkan jatuhnya kabinet Bucho yaitu banyaknya ketidakpuasan dikalangan rakyat Indonesia terhadap kabinet, karena kabinet tidak dapat mengubah keadaan Republik Indonesia menjadi lebih baik, sehingga rakyat merasa perlu adanya perubahan dalam pemerintahan dan pada waktu itu seorang yang dianggap mampu memperbaiki keadaan negara adalah Sjahrir.<sup>20</sup>

---

<sup>18)</sup> *Ibid.*, hal. 142-144.

<sup>19)</sup> George McTurnan Kahin, *op. cit.*, hal. 191-192.

<sup>20)</sup> Moedjanto, *op. cit.* Hal. 142, lihat juga Mavis Rose, hal.214

## **B. Dampak dari Jatuhnya Kabinet Bucho bagi Pemerintah**

Pada tanggal 14 November 1945, kabinet Bucho telah jatuh dan diganti dengan Kabinet Sjahrir I atau kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Dengan diubahnya sistem kabinet presidensiil menjadi sistem kabinet parlementer telah membawa perubahan-perubahan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia, karena kekuasaan presiden dapat dibatasi oleh sebuah badan yang statusnya sama dengan DPR atau MPR yang bernama KNIP.

Pada waktu Republik Indonesia menganut sistem kabinet Presidensiil, kabinet dipimpin langsung oleh presiden sendiri, tetapi setelah diganti menjadi sistem kabinet parlementer, menteri-menteri dalam kabinet dipimpin oleh perdana menteri, jadi kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara saja, tidak merangkap sebagai PM.

Sistem pemerintahan kabinet parlementer telah memberi perubahan yang besar dalam pemerintahan. Kabinet parlementer atau dikenal dengan Kabinet Sjahrir ini, berusaha untuk mengganti struktur pemerintahan RI yang bersih dari campur tangan Jepang dan berwibawa di mata rakyat maupun dunia Internasional. Sjahrir berusaha mengubah susunan kabinet yang dulu terdiri dari orang-orang yang mau diajak kerjasama dengan Jepang, diganti dengan susunan kabinet baru yang terdiri dari orang-orang yang anti penjajah Jepang.<sup>21</sup>

---

<sup>21)</sup> Soebadio Sastrosatomo, *Perjuangan Revolusi*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987, hal. 99.

Menteri-menteri yang dipilih oleh Sjahrir merupakan orang-orang dari yang pada waktu kabinet Bucho menjalankan pemerintahan, mereka tidak pernah ikut aktif dalam pemerintahan, kecuali Amir Sjarifuddin dan Ir. Surachman yang merupakan menteri dalam kabinet Bucho yang dipilih untuk duduk dalam kabinet parlementer. Sjahrir memilih mereka, karena mereka tidak pernah mau diajak kerja sama dengan Jepang dan merupakan seorang nasionalis yang mendukung revolusi.<sup>22</sup>

Susunan Kabinet Sjahrir I ini memang bersih dari noda kerjasama dengan Jepang, tetapi menteri-menteri yang duduk dalam kabinet tersebut terdiri dari orang-orang yang pada jaman pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Indonesia merupakan pegawai-pegawai tinggi dalam pemerintahan Hindia Belanda, mereka juga telah bekerjasama dengan penjajah Belanda, sehingga berbau Belanda.<sup>23</sup>

Pada masa pemerintahan kabinet Bucho kurang mendapat dukungan dari negara lain, karena banyak negara yang berpandangan bahwa pemerintahan RI banyak mendapat bantuan dari pemerintah Jepang dan kabinet Bucho dianggap kabinet buatan Jepang, sehingga popularitas kabinet Bucho semakin merosot dan akhirnya jatuh, karena tidak mendapat dukungan dari negara lain.<sup>24</sup>

Selain itu kabinet Bucho juga kurang mendapat dukungan dari rakyat, karena selama kabinet Bucho menjalankan pemerintahan, keadaan tidak lebih

---

<sup>22)</sup> George McT Kahin, *op. cit.*, Hal. 213.

<sup>23)</sup> Soebadio Sastrosatomo, *op. cit.*, hal. 99, lihat juga Moedjanto dalam, *Indonesia Abad ke-20. Jilid I*, hal. 153.

<sup>24)</sup> Moedjanto, *op. cit.*, hal. 144.

baik bahkan semakin kacau, sehingga kepercayaan yang diberikan rakyat kepada pemimpin mereka semakin pudar dan tidak puas dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Dalam situasi yang sulit ini Sjahrir dianggap orang yang mampu merubah keadaan RI menjadi lebih baik lagi, sehingga gagasan Sjahrir untuk mengubah sistem kabinet Presidensiil menjadi kabinet Parlementer mendapat dukungan dari sebagian rakyat Indonesia dan golongan pemuda yang tergabung dalam gerakan bawah tanah. Sjahrir berusaha untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, karena tanpa adanya dukungan dari rakyat pemerintahan tidak akan berjalan lancar. Usaha Sjahrir yang harus dilakukan yaitu menyingkirkan orang-orang yang mau diajak kerjasama dengan Jepang, sehingga kabinet namanya akan bersih dari cap kolaborator Jepang.

Dampak lain dari jatuhnya kabinet Bucho yaitu kekuasaan presiden akan dibatasi oleh Badan Legislatif yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Pemilu akan diadakan dengan jangka waktu yang telah ditentukan untuk memilih anggota Badan Legislatif yang akan bertugas menyalurkan aspirasi rakyat dan mengawasi segala tindakan presiden, sehingga presiden bertanggungjawab kepada Badan Legislatif. Hal ini akan membatasi kekuasaan presiden. Menurut Sjahrir bahwa pemilu itu bersifat demokratis dan sebagai konsekuensi sifat demokratis dari pemilu adalah ikut sertanya partai-partai politik dalam pemilu.<sup>25</sup>

---

<sup>25)</sup> *Ibid.*, hal. 143

Pada waktu RI menganut sistem kabinet presidensiil, RI hanya mengakui satu partai politik yang dianggap sah, tetapi setelah diganti dengan sistem kabinet parlementer, RI menggunakan sistem multi partai yaitu ada banyak partai yang dianggap sah oleh pemerintah untuk bersaing mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia.

Kabinet parlementer atau kabinet Sjahrir I mulai menerapkan sistem multi partai, sehingga konsekuensinya mempercepat pertumbuhan atau perkembangan partai-partai di RI dan berkaitan dengan sistem konstitusional yang baru itu, maka pengawasan terhadap pemerintah sekarang berada ditangan badan legislatif, kesempatan orang-orang yang dicap sebagai kolaborator Jepang untuk berkuasa kembali sudah jelas tergantung pada kemampuan mereka membangun partai-partai politik.<sup>26</sup>

Setelah kabinet Bucho jatuh dan diganti dengan kabinet Sjahrir muncul pertentangan antara Sjahrir dengan bekas anggota kabinet yang telah dibubarkan. Mereka merasa bahwa serangan anti kolaborator yang dilancarkan oleh Sjahrir terhadap kabinet Bucho telah menyebabkan mereka jatuh dan secara tidak adil menghancurkan reputasi mereka. Menteri-menteri yang diberhentikan kebanyakan adalah orang-orang terkemuka dalam partai PNI dan Masyumi, sehingga mereka cenderung mendorong partainya masing-masing untuk menentang Sjahrir dan kebijakan-kebijakan kabinetnya. Pertentangan antara kabinet yang dipimpin oleh Sjahrir dengan orang-orang yang merasa dihancurkan oleh Sjahrir ini berlangsung terus sampai Sjahrir

---

<sup>26)</sup> Ben Anderson, *op. cit.*, hal. 229-130



mengembalikan mandatnya kepada presiden Sukarno dan menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri dalam kabinet Sjahrir I atau kabinet parlementer.<sup>27</sup>

### C. Dampak dari Jatuhnya Kabinet Bucho bagi Bangsa Indonesia

Keadaan RI yang kacau selama masa penjajahan Belanda dan Jepang telah menyebabkan rakyat Indonesia menderita. Pemerintahan yang dipimpin oleh Sukarno tidak dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik, sehingga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin hilang. Hal ini mengakibatkan kabinet Bucho pimpinan Sukarno semakin merosot dan akhirnya jatuh.

Setelah kabinet Bucho jatuh dan diganti dengan kabinet Parlementer atau lebih dikenal dengan kabinet Sjahrir I, maka sedikit demi sedikit telah mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Ketidakpuasan rakyat Indonesia mulai terobati dengan munculnya Sjahrir sebagai perdana menteri yang akan memimpin kabinet barunya dalam menjalankan pemerintahan dan diharapkan akan mampu mengubah keadaan RI menjadi lebih baik dari sebelumnya dan dapat mengatasi situasi yang sulit pada masa peralihan yaitu dari masa pendudukan Jepang menjadi RI yang merdeka dan berdiri sendiri.<sup>28</sup>

---

<sup>27)</sup> George McT Kahin, *op. cit.*, hal. 213.

<sup>28)</sup> Moedjanto, *op. cit.*, hal. 142.



Menjelang berakhirnya kabinet Bucho, muncul gagasan untuk mengganti sistem pemerintahan yang ada dan mengubah struktur pemerintahan. Gagasan itu muncul terutama dari kelompok nasionalis pimpinan Sjahrir. Pertimbangan pokok yang mendasari perubahan-perubahan dalam struktur pemerintahan yang dipelopori oleh Sjahrir dan para pengikutnya adalah keinginan mereka untuk menyelamatkan negara RI dari penyimpangan ke arah pemerintahan otoriter dan organisasi politik yang otoriter.<sup>29</sup> Negara RI menganut sistem partai tunggal, sehingga hanya ada satu partai yang dianggap sah oleh pemerintah, rakyat tidak mempunyai pilihan lain untuk menyalurkan aspirasinya. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan ke arah organisasi politik yang otoriter.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang mengarah pada sifat otoriter dalam organisasi politik, maka Sjahrir berusaha mengganti sistem kepartaian RI agar lebih terlihat sebagai negara yang demokratis. Usaha Sjahrir untuk mengganti sistem partai tunggal dengan sistem multi partai telah disetujui oleh Sukarno-Hatta, sehingga PNI sebagai partai tunggal dibubarkan.<sup>30</sup> Dengan diterapkannya sistem yang baru tersebut, pertumbuhan partai politik sangat pesat. Partai-partai didirikan dan mulai bersaing untuk mendapatkan simpati dari rakyat.

Munculnya partai-partai baru telah membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Selain itu

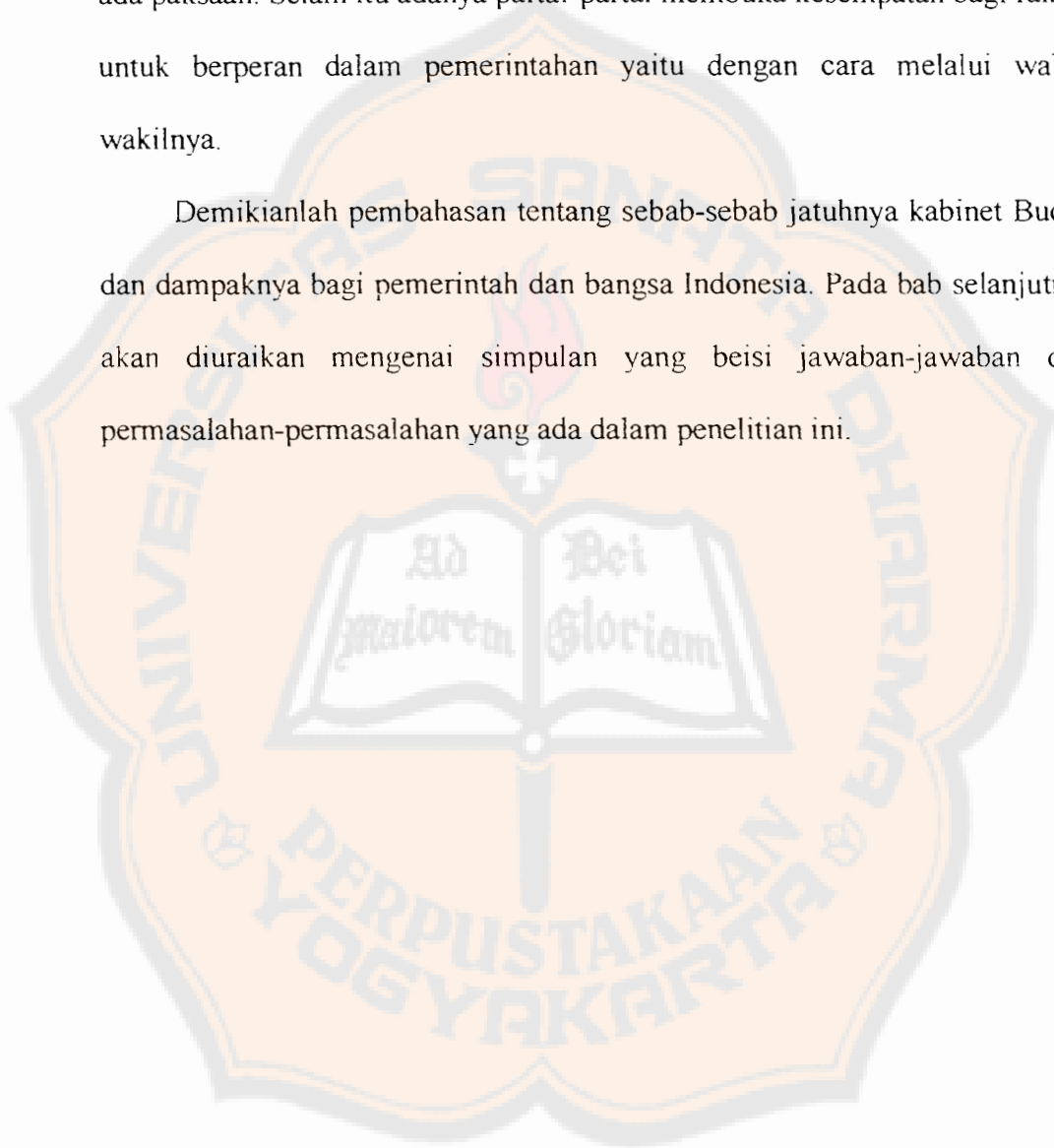
---

<sup>29)</sup> George McT Kahin, *op. cit.*, hal. 193.

<sup>30)</sup> *Ibid.*, hal. 186.

munculnya banyak partai membawa perubahan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang terlihat lebih demokratis, karena rakyat akan lebih bebas memilih partai politik yang dianggap mampu menyalurkan aspirasinya tanpa ada paksaan. Selain itu adanya partai-partai membuka kesempatan bagi rakyat untuk berperan dalam pemerintahan yaitu dengan cara melalui wakil-wakilnya.

Demikianlah pembahasan tentang sebab-sebab jatuhnya kabinet Bucho dan dampaknya bagi pemerintah dan bangsa Indonesia. Pada bab selanjutnya akan diuraikan mengenai simpulan yang berisi jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.



## BAB V

### SIMPULAN<sup>1</sup>

Situasi politik bangsa Indonesia masih sangat kacau, karena setelah Indonesia merdeka bangsa Jepang masih berada di Republik Indonesia untuk mempertahankan status quonya sampai Sekutu datang, sehingga seolah-olah ada dua pemerintahan yang berkuasa di Republik Indonesia. Keadaan ekonomi yang semakin merosot akibat penjajahan telah mengakibatkan kehidupan sosial masyarakat Indonesia semakin menderita, kelaparan dan kemiskinan merajalela, pengangguran semakin meningkat, menyebabkan banyak kerusuhan-kerusuhan terjadi dalam masyarakat. Kebudayaan bangsa Indonesia banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan asing yang dibawa oleh penjajah, terutama dalam bidang pendidikan dan tradisi-tradisidalam masyarakat.

Setelah Republik Indonesia merdeka dan mempunyai pemerintahan sendiri, presiden dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh menteri-menteri dalam kabinet yang dipimpin oleh Sukarno. Pembentukan kabinet tersebut mendapat tentangan dari beberapa golongan nasionalis yang tidak setuju dengan susunan kabinet tersebut, karena orang-orang yang duduk dalam kabinet tersebut mayoritas bekas pegawai tinggi dalam pemerintahan Jepang, mereka mempunyai status dan kedudukan atau jabatan yang sama, sehingga pemerintahan seperti kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, tidak terlihat sebagai pemerintahan yang baru berdiri. Golongan yang tidak menyetujui

---

1) Lihat dari *Kesimpulan ke Simpulan* oleh G. Moedjanto dalam Kedaulatan Rakyat, tanggal 28 Oktober 2000, hal. 8.

pembentukan kabinet tersebut menyebutnya dengan nama kabinet Bucho, sesuai dengan susunan kabinet yang terdiri dari kepala departemen dalam pemerintahan Jepang. Pada pertengahan bulan September 1945, rakyat mulai merasakan bahwa pemerintah tidak bisa memperbaiki keadaan, sehingga muncul ketidakpuasan dalam masyarakat terhadap pemerintah. Ketidakpuasan rakyat diwujudkan dalam aksi-aksi demonstrasi yang menuntut agar pemerintah bersikap tegas terhadap kekuasaan asing dan tetap mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Kedudukan kabinet Bucho semakin terpuruk, karena tidak mendapat dukungan dari rakyat dan golongan nasionalis yang mendukung revolusi. Banyak kritik muncul terhadap kabinet tersebut, kritik yang pedas muncul dari Sjahrir yang salah satunya telah menyebabkan jatuhnya kabinet Bucho dan diganti dengan kabinet Parlemitter atau di kenal dengan kabinet Sjahrir I yang dipimpin oleh perdana menteri. Hal ini memberi perubahan dalam struktur pemerintahan dan membersihkan pemerintahan dari orang-orang yang telah bekerjasama dengan penjajah. Dengan diterapkannya sistem kabinet Parlemitter, maka partai tunggal dianggap sudah tidak sesuai lagi, sehingga diganti dengan sistem multi partai yang mengakibatkan pertumbuhan partai-partai politik sangat pesat. Hal ini akan lebih mencerminkan negara yang demokratis, karena rakyat lebih bebas memilih partai yang dikehendaki dan dianggap mampu menyalurkan aspirasinya.

Demikianlah pembahasan penelitian tentang kabinet Bucho di Indonesia (31 Agustus-14 November 1945).

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Ben, 1988. *Revoloesi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944 – 1946*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Anwar, Rosihan (Ed), 1980. *Mengenang Sjahrir*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Bahar, Saafroedin, dkk, 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta : Sekretariat Negara RI
- Chandra, T., 1992. *Kamus Jepang Indonesia*, Jakarta : Evergreen Japanese Course.
- Dahm, Bernhard, 1987. *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta : LP3ES.
- Darmosugito, Pitoyo, 1982. *Menjelang Indonesia Merdeka*, Jakarta : PT. Gunung Agung
- Depdikbud, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Gottschalk, Louis, 1983. *Mengerti Sejarah*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Hatta, Mohammad. 1978. *Memoir*. Jakarta : Tintamas Indonesia.
- Kahin, G. McT., 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Jakarta : Sebelas Maret University Press bekerjasama dengan Pustaka Sinar Harapan.
- Kansil, C.S.T., 1990. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Kartodirdjo, Sartono. dkk., 1977. *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo, 1995, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya.
- Lubis, Abu Bakar, 1992. *Kilas Balik Revolusi Kenangan, Pelaku, Saksi*, Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Martosewojo, Soejono, 1984. *Mahasiswa \* 45 Prapatan-10 : Pengabdiannya, Jilid I*, Bandung: Patma.
- Moedjanto, G., 1988. *Indonesia Abad ke-20. Jilid I*. Yogyakarta : Kanisius.

Naskah Departemen Penerangan, 1970. *Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia Selama 25 tahun 1945-1970*, Jakarta : Pradnja Paramita

Nasution, A.H, 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 1, Proklamasi*, Bandung: Angkasa.

Rose, Mavis.1991, *Indonesia Merdeka Biografi Mohammad Hatta*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Sastrosatomo, Soebadio, 1987. *Perjuangan Revolusi*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Wild, Colin dan Peter, Cerey, 1986. *Gelora Api Revolusi Sebuah Ontologi Sejarah*. Jakarta : PT Gramedia.

